



PUTUSAN

Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Ir. DUDI JOCOM, M.Si**;
Tempat lahir : Banggai Sulawesi Tengah;
Umur/ tanggal lahir : 55 tahun / 26 April 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merbabu G/16 Komplek Kodau V RT.001
RW.002, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati
Asih, Bekasi, Jawa Barat;
Perum Mediterania Jalan Dr. Ratna Blok CB
Nomor 8 Jati Bening, Bekasi;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian
Dalam Negeri;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau

Hal. 1 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 1 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Dudi Jocom, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Dudi Jocom, M.Si., berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Ir. Dudi Jocom, M.Si., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, apabila harta tidak mencukupi maka dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Dokumen dalam *odner* plastik warna biru berisikan:
 - a. 1 (satu) lembar *copy* Daftar Isi;
 - b. 1 (satu) lembar *copy* Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Hal. 2 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penjamin;

- c. 5 (lima) lembar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1097 tahun 2010 beserta lampirannya;
- d. 5 (lima) lembar *copy* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1127 tahun 2010 beserta lampirannya;
- e. 22 (dua puluh dua) lembar *copy* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2011 beserta lampirannya;
- f. 2 (dua) lembar *copy* Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan kegiatan kampus IPDN Baso Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011;
- g. 2 (dua) lembar *copy* *Bill of Quantity* (BQ) pekerjaan kegiatan kampus IPDN Baso Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011;
- h. 2 (dua) lembar *copy* Dokumen draft Surat Perjanjian;
- i. 27 (dua puluh tujuh) lembar Dokumen Draft Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- j. 3 (tiga) lembar *copy* Dokumen Draft Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- k. 1 (satu) lembar *copy* Bank Garansi BRI Nomor 032917110288;
- l. 2 (dua) lembar *copy* Bank Garansi BRI Nomor 032917110284;
- m.1 (satu) lembar *copy* Bank Garansi BRI Nomor 032917110288;
- n. 4 (empat) lembar *copy* Dokumen Pekerjaan Tambah Kurang Pembangunan Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011;
- o. 11 (sebelas) lembar *copy* Dokumen Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 011/420/PAKPANII/2011 tanggal 6 Juli 2011 pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011;
- p. 16 (enam belas) lembar *copy* Dokumen Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 011/22/PAKPANI/2011 tanggal 6 Juni 2011 Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provisni Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011;
- q. 33 (tiga puluh tiga) lembar *copy* Dokumen Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 011/1075/PAKPA/IX/2011 tanggal 23 September 2011 pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung

Hal. 3 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011;

2. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Pelelangan Nomor 96/PU/KK/KDNNII/2011 tanggal 21 Juli 2011 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. 1 (satu) bundel Dokumen Lelang Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Bukit Tinggi Sumatera Barat pada Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011;
4. 1 (satu) bundel Dokumen *copy*, Kronologis Pembangunan Gedung IPDN Kampus Sumatera Barat Tahun 2011;
5. 1 (satu) *Odner* warna *oranye* yang bertuliskan "Dokumen Proyek IPDN Sumbar Tahun 2011";
6. 1 (satu) bundel *copy* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1097 Tahun 2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Tahun Anggaran 2011 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
7. 5 (lima) lembar *copy* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
8. 1 (satu) bundel *copy* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
9. 1 (satu) bundel *copy* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
10. 2 (dua) lembar *copy* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811.212.2-707 Tahun 2010 tanggal 17-9-2010 (SK Pengangkatan Ir. Dudy Jocom pada jabatan Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Sekretariat Jenderal Kemendagri), beserta 1

Hal. 4 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bundel *copy* Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 811.212.2/2023/SJ tanggal 17 September 2010, ditandatangani oleh Kiswanto, S.H;

11. 2 (dua) lembar *copy* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-147 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1126 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 ditandatangani Diah Anggraeni atas nama Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal, beserta 3 (tiga) lembar *copy* lampirannya;

12. 4 (empat) lembar *copy* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 027-129 Tahun 2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011;

13. 3 (tiga) lembar *copy* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 027-130 Tahun 2011 tentang Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Februari 2011;

14. 3 (tiga) lembar *copy* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811.212.3-708 Tahun 2010 tanggal 17-9-2010 (SK Urkanus Sihombing menjadi Kepala Bidang Analisis Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Kajian Kebijakan Strategik Setjen Kemendagri);

15. 3 (tiga) lembar *copy* Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811.212.3-682 Tahun 2009 tanggal 24 September 2009, ditujukan kepada Drs. Burhanuddin, jabatan baru Kepala Bidang Inventarisasi Kekayaan Milik Negara pada Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Asset Sekretariat Jenderal;

16. 3 (tiga) lembar *copy* Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811.212.3.708 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010, ditujukan

Hal. 5 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Drs. Burhanuddin, jabatan baru Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Badan Litbang Kemendagri;

17. 5 (lima) lembar *copy* Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811.212.2-530 Tahun 2012 tanggal 7 Agustus 2012 (SK Restuardy Daud sebagai Kepala Pusat Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi Sekretariat Jenderal);
18. 3 (tiga) lembar *copy* Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811.212.3-708 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 (SK Restuardy Daud sebagai Kepala Bagian Perencanaan Program pada Biro Perencanaan Setjen Kemendagri);
19. 1 (satu) bundel *copy* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-738 tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010;
20. 1 (satu) bundel *copy* Surat Nomor 011/3438/SJ tanggal 13 September 2011 Perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kapus IPDN di Provinsi Sumatera Barat;
21. 3 (tiga) lembar *copy* Nota Dinas Nomor 667/SJ/2011 tanggal 23 Agustus 2011, perihal Laporan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jas untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di 4 (empat) Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Riau) Tahun Anggaran 2011. Ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, ditandatangani oleh Diah Anggraeni, Sekretaris Jenderal. Pada Dokumen tersebut terdapat tulisan tangan "Sekjen, 1. Penetapan", paraf dan tanggal "23/8/11";
22. 1 (satu) lembar *copy* Surat Nomor 660/2061/PAKPA/XI/2011 tanggal 23 November 2011 Hal: Pengantar Studi AMDAL;
23. 1 (satu) bundel *copy* Surat Nomor 700/2652/SJ tanggal 10 Juli 2011 Perihal: TLHP BPK RI;

Hal. 6 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 4 (empat) lembar *copy* Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 900.05-292 PAKPA 2011 tentang Tim Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, tanggal 4 Mei 2011;
25. 1 (satu) lembar *copy* Surat Nomor 005/20/Sj/2010 tanggal 27 Desember 2010 Perihal: Undangan Penyerahan DIPA Tahun 2011;
26. 3 (tiga) lembar *copy* Program Peningkatan Sarpras Aparatur Kemendagri;
27. 1 (satu) lembar *copy* Ilustrasi Alur Perencanaan Tahun Anggaran 2011;
28. 3 (tiga) lembar *copy* Dokumen Perencanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011;
29. 3 (tiga) lembar *copy* Surat Nomor BU.01.06-Cb/79 tanggal 19 Januari 2011 Perihal: Pendapat Teknis Pekerjaan Lanjutan Pengadaan Konsultan Perencanaan Untuk Pembangunan Gedung Kampus IPDN Daerah;
30. 1 (satu) bundel asli Surat Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor KP.01.08- Cb/182 tanggal 10 Februari 2011 dan lampirannya;
31. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Nomor 826.2/29/01.PAKPA tanggal 25 Februari 2015 (Itriah Afsolin sedang melaksanakan tugas belajar (S2) terhitung mulai tanggal 1 September 2004 sampai dengan 31 Agustus 2015) dengan lampiran 2 (dua) lembar *copy* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 894-1655 Tahun 2014 tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar (S2) pada Program *Master Of Arts Governance And Public Policy The University Of Sheffield* dan 1 (satu) lembar Surat Nomor R-228/22/02/2015 tanggal 23 Februari 2015 Perihal: Permintaan Keterangan;

Hal. 7 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 3 (tiga) lembar *copy* Keputusan Direksi PT. Utama Karya (Persero) Nomor 1739/KPTS/41/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Susunan Pengurus Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan PT. Haka pole dan PT. Hakaaton;
33. 3 (tiga) lembar *copy* Deskripsi Jabatan Direktur Produksi, mulai berlaku 20 Desember 2005 dan 3 (tiga) lembar *print out Curriculum Vitae* atas nama Ir. R Soetanto, M.M;
34. 1 (satu) bundel *copy* Keputusan Direksi PT. Utama Karya (Persero) Nomor 1615/KPTS/20/2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Perubahan Struktur Organisasi Kamtor Pusat, Divisi dan Wilayah;
35. 1 (satu) bundel *copy* Keputusan Direksi PT. Utama Karya (Persero) Nomor 001/KPTS/01/2011 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat pada Divisi Pemasaran tanggal 3 Januari 2011, ditandatangani oleh S. Subagyo, Direktur Utama PT. Utama Karya (Persero);
36. 1 (satu) bundel *copy* Keputusan Direksi PT. Utama Karya Nomor 1083/KPTS/14/2011 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat PT. Utama Karya (Persero) tanggal 31 Mei 2011, ditandatangani oleh S. Subagyo, Direktur Utama PT. Utama Karya (Persero);
37. 1 (satu) bundel *copy* Keputusan Direksi PT. Utama Karya (Persero) Nomor 1640/KPTS/23/2011 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat PT. Utama Karya (Persero) tanggal 27 Juli 2011, ditandatangani oleh Ir. Tri Widjanto J, M.T., Direktur Utama PT. Utama Karya (Persero);
38. 2 (dua) lembar *copy* Dokumen, Nomor Dokumen OPS/DDO/P/002 Diterbitkan tanggal 29 Maret 2010: Halaman 16-17 dari 19;
39. 1 (satu) lembar *copy* Surat Nomor HKDG/Smr.1842/ST/199 tanggal 20 Oktober 2011, Hal: Penugasan (Remon Debal sebagai *Deputy Project Manager* pada Proyek IPDN Bukit Tinggi);
40. 2 (dua) lembar *copy* Surat tanggal 10 September 2012, Hal:
Hal. 8 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengunduran Diri (Remon Debal) dengan lampiran Surat Keterangan Kesehatan;

41. 1 (satu) lembar *copy* Berita Acara Serah Terima Kartu ATM atas nama Gregorius Aji Sentosa tanggal 27 Januari 2012, ditandatangani oleh Remon Debal, S.T., dan Dedy Susetyo, S.E.;
42. 1 (satu) lembar *copy* Surat PT. Utama Karya Nomor HKDG/Smr.2145/ST/228 Hal Tugas Perbantuan Kepada Sdr. G. Aji Sentosa, S.T., tanggal 15 November 2011;
43. 1 (satu) lembar *copy* Surat Nomor HKDG/Smr.180/UDP/02 tanggal 26 Januari 2012, Hal: Koordinasi Pembagian Tugas (Pergantuan Tugas Operasional Proyek di lapangan dari Ir. Padi Lestario kepada Remon Debal);
44. 1 (satu) lembar *copy* Surat Nomor HKDG/Smr.1208/ST/104 tanggal 6 Juli 2012, Perihal: Penugasan (Yusuf Sitorus sebagai SOM Proyek Mall Saint Morits);
45. 1 (satu) lembar *copy* Surat Nomor HKDG/Smr.1784/ST/194 tanggal 18 Oktober 2011, Perihal: Penugasan (Yusuf Sitorus sebagai SOM pada Proyek IPDN Bukit Tinggi);
46. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar *copy* Surat Nomor 179/KPTS/04/2011/5-7 tanggal 25 Januari 2011 Perihal: Pembebasan dan Pengangkatan Kembali sebagai Pejabat (Pengangkatan Rudy Hertanto sebagai GM Sumber Daya pada Direktorat IV);
 - b. 1 (satu) lembar *copy* Surat Nomor 1640/KPTS/23/2011/1-91 tanggal 27 Juli 2011 Perihal: Pembebasan dan Pengangkatan sebagai Pejabat (Pengangkatan Rudy Hertanto sebagai GM Produksi pada Direktorat Operasi I);
 - c. 1 (satu) lembar *copy* Surat Nomor 121/KPTS/05/2012/1-23 tanggal

Hal. 9 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2012 Perihal: Pembebasan dan Pengangkatan sebagai Pejabat (Pengangkatan Rudy Hertanto sebagai GM SOM & Umum pada Direktorat SOM & Umum);

d. 1 (satu) lembar *copy* Surat Nomor GMSU/Gh.1323/UDP/65 tanggal 30 Juli 2012 Perihal: Pengakhiran Hubungan Kerja Dengan Mendapat Hak Pensiun Normal;

47. 15 (lima belas) lembar *copy* Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1260004347711, nama R. Pedi Lestario periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2014;

48. 19 (sembilan belas) lembar *copy* Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1110006241331, nama R. Pedi Lestario periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2014;

49. 19 (sembilan belas) lembar *copy* Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1050004679845, nama Remon Debal periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2014;

50. 7 (tujuh) lembar *copy* Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1110006322479, nama Remon Debal periode 17 Februari 2012 sampai dengan 1 Agustus 2013;

51. 6 (enam) lembar *copy* Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1080001363838, nama Remon Debal periode 1 Januari 2011 sampai dengan 1 Maret 2014;

52. 5 (lima) lembar *copy* Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1110012031973, nama Gregorius Aji Sentosa periode 18 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2014;

53. 12 (dua belas) lembar *copy* Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1260004019930, nama Gregorius Aji Sentosa periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2014;

54. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Daftar Harga Satuan Upah, Bahan,

Hal. 10 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan (HSPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Triwulan III (September) tahun 2010;

55. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Daftar Harga Satuan Upah, Bahan, Pekerjaan (HSPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Triwulan III (September) tahun 2011;

56. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Daftar Harga Satuan Upah, Bahan, Pekerjaan (HSPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Triwulan III (September) tahun 2012;

57. 1 (satu) bundel *fc* Dokumen Surat Penawaran Harga dan Daftar Analisa Pekerjaan Atap Baja Ringan Gonjong IPDN Baso Tahun Anggaran 2011 dari sdr. Sudiswar;

58. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Analisa Harga Satuan dan Barang, Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, PT. Bina Karya (Persero);

59. 1 (satu) lembar *copy* Pengumuman Prakualifikasi Nomor 08/Peng/P3/KK/KDNN/2011 Iklan Harian: Koran Tempo Hal: F9, Hari/tanggal: Senin, 30 Mei 2011, Perihal: Pengumuman PQ/Lelang;

60. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen terkait Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2011, yang terdiri dari:

a) Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis Nomor 169/BA/EV /KK/KDNN/11/2011 tanggal 10 Agustus 2011;

b) Pengumuman Peringkat Teknis Nomor 181/Peng/P3/KK/KDNN/2011, tanggal 11 Agustus 2011;

Hal. 11 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar *copy* Surat Setjen Kemendagri Nomor 175/Und/KK/KDNNIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011, perihal Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II, ditujukan kepada PT. Utama Karya, PT. Wijaya Karya dan PT. Wasita Karya. Ditandatangani oleh Mohammad Noval, S.T., Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi di lingkungan Setjen Kemendagri;

62. *Copy* Dokumen yang terdiri dari:

- a) 2 (dua) lembar *copy* Surat PT. Utama Karya, Divisi Gedung, Nomor HK.DG/A.1357/TENDER/066 tanggal 12 Agustus 2011 ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, perihal Penawaran Harga untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat. Ditandatangani oleh Ir. K Budi Rachmat, M.M., General Manager Divisi Gedung, PT. Utama Karya;
- b) 2 (dua) lembar *copy* Dokumen Rekapitulasi Biaya, nilai pembulatan Rp125.686.000.000,00 ditandatangani di Jakarta tanggal 12 Agustus 2011 oleh Ir. Budi Rachmat K, M.M., General Manager Divisi Gedung, PT. HK;

63. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen terkait Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2011, yang terdiri dari:

- a) Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga Nomor 144/SA/PPH/KK/KDNNIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011;
- b) Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Harga Nomor 177/SA/EV/KK/KDNNIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011;
- c) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 180/SA/EV/KK/KDNNIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011;

64. 1 (satu) lembar *copy* Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 011 /3438/SJ, tanggal 13 September 2011, perihal

Hal. 12 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemendagri, ditandatangani oleh Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri selaku Pengguna Anggaran;

65. 1 (satu) lembar *copy* Pengumuman Pemenang Nomor 299/Peng/P3/KK/KDN/IX/ 2011 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, ditandatangani di Jakarta tanggal 13 September 2011 oleh Mohammad Noval, S.T., Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi di lingkungan Sekretariat Jenderal;
66. 1 (satu) lembar *copy* Surat Setjen Kemendagri, Nomor 027 /1057, PAKP A/IX/2011 tanggal 21 September Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, ditujukan kepada Direktur PT. Utama Karya (Persero), ditandatangani oleh Ir. Dudy Jocom, Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
67. 1 (satu) bundel *copy* Nota Dinas Nomor 562/PSMN/IX/12 tanggal 31 Oktober 2011 Perihal: Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat minggu kelima;
68. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar *copy* Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/1820.3/SASTPHP/PAKPA/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011;
 - b. 1 (satu) lembar *copy* Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama Ir. Sudi Rachmat Kurniawan, M.M., Jabatan *General Manager* PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung;
69. 5 (lima) lembar *copy* Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Hal. 13 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tahap III) Nomor 027/1761.2/SASTPHP/PAKPA/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 06/SAPKP-HKDG/IPDN ST/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011;

70. 2 (dua) lembar *copy* Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan Pelaksana Nomor 027/2023/SAST/PAKPA/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011, Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, lokasi Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;

71. 2 (dua) lembar *copy* Berita Acara Pemeriksaan Dalam Masa Pemeliharaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Nomor 534/SAP/PAKPANIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012;

72. 2 (dua) lembar *copy* Berita Acara Serah Terima II Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Nomor 027/1561/SASTNIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012;

73. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi, Kuitansi Nomor 01/U.Muka/IPDN/September/2011 tanggal 28 September 2011, dari Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp25.137.200.000,00, untuk pembayaran Pembayaran uang muka Pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan SPMK Nomor 027/1078/PAKPA/IX/2011 dan Kontrak Nomor 011/1075/PAKPA/IX/2011 tanggal 23 September 2011, MAK.010.01.02-1224.01.011.533111;

74. 1 (satu) bundel *copy* Surat Nomor HK.DG/R.4100/DIV.C/325 tanggal 30 November 2011 Perihal: Pembayaran Tahap Pertama Pekerjaan Kostruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011;

75. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Nomor 03/Tahap ke-2/IPDN/XII/2011 tanggal 30 November 2011, Dari: Kuasa Pengguna Anggaran

Hal. 14 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp30.164.640.000,00, untuk pembayaran: Pembayaran Tahap Kedua Pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kostruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan SPMK Nomor 027/1078/PAKPNIX/2011 dan Kontrak Nomor 011/1075/PAKPNIX/2011, tanggal 23 September 2011, MAK.010.01.02-1224.01.011.533111 dan *Progress* 55,5998%;

76. 1 (satu) bundel *copy* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor S45627T /133/110 tanggal 20-10-2011;
77. 1 (satu) bundel *copy* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor S84138T/133/110 tanggal 14-12-2011;
78. 1 (satu) bundel *copy* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 160439X/133/110 tanggal 22-12-2011;
79. 1 (satu) bundel *copy* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 163654X/133/110 tanggal 27-12-2011;
80. 1 (satu) bundel *copy* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 164934X/133/110 tanggal 29-12-2011;
81. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen dalam Map Plastik yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bundel *copy* Daftar *Suplier* Item Dominan (SKBDN);
 - b. 1 (satu) bundel *copy* Daftar Kontrak Subkontraktor Divisi dan Realisasi Tagihan Tahun 2011-2012;
 - c. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Nomor 01/U.Muka/IPDN/September/2011 tanggal 28 September 2011 sejumlah Rp25.137.200.000,00, untuk pembayaran: Pembayaran Uang Muka Pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kostruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan SPMK Nomor

Hal. 15 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/1078/PAKPNIX/2011 dan Kontrak Nomor 011/1075/PAKPNIX/2011, tanggal 23 September 2011, MAK.010.01.02-1224.01.011.533111;

d. 1 (satu) bundel *copy* Surat Nomor HK.DG/R.4100/DIV.C/325 tanggal 30 November 2011 Perihal: Pembayaran Tahap Pertama Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011 (Kuitansi Nomor 01/Tahap ke-1/IPDN/XI/2011 tanggal 30 November 2011 sejumlah Rp20.109.760.000,00 untuk pembayaran: Pembayaran Tahap Pertama Pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan SPMK Nomor 027/1078/PAKPA/IX/2011 dan Kontrak Nomor 011/1075/PAKPA/IX/2011 tanggal 23 September 2011, MAK.010.01.02-1224.01.011.533111 dan *Progress* 25,3961%);

e. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Nomor 03/Tahap ke-2/IPDN/XII/2011 tanggal 30 November 2011 sejumlah Rp30.164.640.000,00 untuk pembayaran: Pembayaran Tahap Kedua Pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan SPMK Nomor 027/1078/PAKPA/IX/2011 dan Kontrak Nomor 011/1075/PAKPA/IX/ 2011, tanggal 23 September 2011, MAK.010.01.02-1224.01.011.533111 dan *Progress* 55,5998%);

f. 1 (satu) bundel *copy* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 160439X/133/110 tanggal 22-12-2011;

82. 3 (tiga) lembar *copy* Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjamin yang ditandatangani oleh Ir. Budi Rachmat Kurniawan, M.M., tanggal 18 April 2012;

Hal. 16 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 2 (dua) lembar *copy* Jaminan Bank (Bank Garansi) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 032917110284 dengan nilai Rp20.109.760.000,00 (dua puluh miliar seratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
84. 1 (satu) lembar *copy* Bank Garansi (Jaminan Pemeliharaan) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 032917110288 dengan nilai Rp6.284.300.000,00 (enam miliar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
85. 3 (tiga) lembar *copy* Buku Daftar Surat Dibawah Tangan yang dibukukan, diterbitkan oleh Ikatan Notaris Indonesia 2006;
86. 1 (satu) bundel asli Anggaran Rencana Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Baso Kabupaten Agam Nomor Karya K.09.01 PT. Utama Karya;
87. 1 (satu) *odner* warna putih berisikan Dokumen BQ Proyek IPDN Baso;
88. 1 (satu) lembar *copy* *Master Schedule* Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam PT. Utama Karya (Persero) tertanggal 29 Desember 2011;
89. 1 (satu) lembar *copy* *Master Schedule* Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam PT. Utama Karya (Persero) tertanggal 23 September 2011 (tidak ada tanda tangannya);
90. 1 (satu) bundel Dokumen Gambar Kerja/*Shop Drawing* untuk pemasangan atap pada gedung auditorium gedung administrasi, Rumah doa (T125), serta rumah dinas (T 72);
91. 3 (tiga) lembar *copy* Jadwal Penyelesaian
Hal. 17 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Monitoring Gedung Administrasi Proyek IPDN Kabupaten Agam - Sumatera Barat (Januari 2012 dan Februari 2012);

92. 6 (enam) lembar copy Jadwal Penyelesaian dan Monitoring Gedung Administrasi Proyek IPDN Kabupaten Agam - Sumatera Barat (Oktober 2011, November 2011 dan Desember 2011);
93. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 05/LKP-HKDG/IPDN BT/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampirannya;
94. 1 (satu) bundel map merah yang di depannya terdapat *print out* Rekapitulasi Prestasi Mingguan Kemajuan Pekerjaan Periode 15 (lima belas) tanggal 30 Desember sampai dengan 5 Januari 2012 Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat lokasi Kabupaten Agam;
95. 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Prestasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 3 April 2012 yang dibuat oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Arkitek Team Empat ditandatangani oleh Dedi Junaidi selaku *Site Manager*;
96. 4 (empat) lembar *print out capture blackberry messenger display name*: BR I Budi HK, Dikirim Sel@ 19:58 - 22:51;
97. 5 (lima) lembar copy Pengesahan Direksi PT. Hutama Karya (Persero) tentang Anggaran Rencana Pelaksanaan, Berdasarkan Rapat Eksekutif Pelaksanaan (REP) tanggal 28 Oktober 2011;
98. 1 (satu) bundel copy Foto *Progres* 100% Proyek Pembangunan IPDN Sumatera Barat;
99. 1 (satu) bundel asli Dokumen foto Dokumentasi Pekerjaan Atap Baja Ringan Gonjong IPDN Baso Tahun Anggaran 2011;

Hal. 18 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) bundel Dokumen asli *Progress* Visual sampai tanggal 11 Maret 2012 Proyek Pembangunan Kampus IPDN Bukit Tinggi Sumatera Barat Konsultan Manajemen Konstruksi Arkitek Team Empat dan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia;
101. 1 (satu) bundel *print out* Laporan Pemeriksaan Lapangan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Regional di Kabupaten Agam, Sumatera Barat tanggal 6 Januari 2013;
102. 1 (satu) bundel Dokumen asli Pengujian Material Urugan Pilihan Pekerjaan Parkir dan Jalan Lingkungan Kampus IPDN di Baso PT. Utama Karya Oktober 2011;
103. 1 (satu) bundel Dokumen asli Laporan Pelaksanaan Pengujian Dinamis Pondasi Tiang Pancang dengan *Metode Pile Driving Analyzer (PDA) Test Doc.* Nomor080/PDA-HK/SB/XI/2011;
104. 1 (satu) bundel *copy* Surat Nomor 050/4117/SJ Perihal: Rancangan Renstra Depdagri Tahun 2010-2014 tanggal 20 November 2009, Rancangan Renstra Depdagri Tahun 2010-2014: Surat Menteri Dalam Negeri kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi dan Kepala UKP4;
105. 1 (satu) bundel *copy* Surat Nomor 050/4661/SJ Perihal: Renstra Depdagri Tahun 2010-2014 tanggal 28 Desember 2009, Penyempurnaan Rancangan Renstra Depdagri Tahun 2010-2014: Surat Menteri Dalam Negeri kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi dan Kepala UKP4;
106. 1 (satu) bundel *copy* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 20 Januari 2010, Rencana Pembangunan

Hal. 19 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Lampiran Buku 11: Rencana Tindak Kementerian/Lembaga Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 Per Kementerian/Lembaga, Kementerian Dalam Negeri: 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur Kementerian Dalam Negeri;

107. 1 (satu) bundel Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi, Nomor 050/265/SJ Perihal: Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 tanggal 30 Januari 2010 beserta lampirannya;

108. 1 (satu) buku *copy* Permendagri Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 30 Januari 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014;

109. 1 (satu) bundel *copy* Materi Sidang Kabinet tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 lingkup Kemendagri, tanggal 24 Maret 2010;

110. 1 (satu) bundel *copy* Materi Sidang Kabinet Paripurna Bidang Perekonomian tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 lingkup Kemendagri, tanggal 5 April 2010;

111. 1 (satu) bundel *copy* Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Republik Indonesia perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 Nomor 0181/M.PPN/04/2010 dan Nomor SE-120/MK/2010 tanggal 6 April 2010;

112. 1 (satu) bundel *copy* TOR Pembangunan Sarpras Sarana Fisik Kampus IPDN Daerah 4 (empat) Daerah Tahun Anggaran 2011, April 2010, beserta lampiran berupa Rencana Anggaran Biaya dan Laporan Akhir *Master Plan* Kampus IPDN

Hal. 20 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Riau;

113. 1 (satu) bundel *copy Trilateral Meeting*
Rencana Kerja Kemendagri Tahun 2011, 12-15 April 2010;
114. 1 (satu) bundel *copy* Materi Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011,
28 April 2010;
115. 1 (satu) bundel *copy* Surat Penyampaian
Pagu Indikatif Hasil *Trilateral Meeting* dan Sekretaris Jenderal kepada
Komponen Kemendagri Nomor 900/17131/SJ tanggal 30 April 2010;
116. 1 (satu) bundel *copy* Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) lingkup Kemendagri, 3 Mei 2010;
117. 1 (satu) bundel *copy* Alokasi Pagu Indikatif
Tahun 2011 Kementerian Dalam Negeri Berdasarkan Program,
Satker dan Alokasi Anggaran, 4 Mei 2010;
118. 1 (satu) bundel *copy* Perpres Nomor 29
Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010, Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
119. 1 (satu) bundel *copy* Materi Kementerian
Dalam Negeri pada Rapat Dengar Pendapat Rencana Kerja
Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 dengan Komisi II
DPR RI, 3 Juni 2010;
120. 1 (satu) bundel *copy* Materi Menteri Dalam
Negeri pada Sidang Kabinet Paripurna Bidang Perekonomian tentang
APBN Tahun 2010 dan RAPBN Tahun 2011, 10 Juni 2010;
121. 1 (satu) bundel *copy* Materi Kementerian Dalam Negeri pada Rapat
Dengar Pendapat Penyempurnaan Alokasi Anggaran Menurut Program
dan Kegiatan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 (Komisi 11 DPR
RI), 16 Juni 2010;
122. 1 (satu) bundel *copy* Surat Edaran Menteri
Hal. 21 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan tentang Pagu Sementara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011 Nomor SE-294/MK.02/2010 tanggal 24 Juni 2010;

123. 1 (satu) bundel *copy* RKA-K/L Tahun 2011 Berdasarkan Pagu Sementara;
124. 1 (satu) bundel *copy* Materi Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011, 2 September 2010, 20 September 2010;
125. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Kesepakatan *Trilateral Meeting* ke 2 Tahun 2010 Berdasarkan Pagu Sementara Kemendagri Tahun 2011, 11-12 Oktober 2010;
126. 1 (satu) bundel *copy* Materi Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011, 21 Oktober 2010;
127. 1 (satu) bundel *copy* Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Definitif Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011 Nomor SE-676/MK.02/2010 tanggal 3 November 2010;
128. 1 (satu) bundel *copy* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, 19 November 2010;
129. 1 (satu) bundel *copy* Pagu Definitif Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 (Persetujuan Komisi II DPR RI), 22 November 2010;
130. 1 (satu) bundel *copy* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2011 tanggal 30 November 2010, beserta Lampiran 1 Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Hal. 22 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 Menurut Organisasi, Bagian Anggaran, Unit Organisasi, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Jenis Belanja, dan Sumber Dana (010) Kementerian Dalam Negeri (010.01) Sekretariat Jenderal Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

131. 1 (satu) bundel *copy* Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri (RKA-K/L) Tahun 2011 Berdasarkan Pagu Definitif, 1 Desember 2010;
132. 1 (satu) bundel *copy* Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor 2863/010-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010;
133. 1 (satu) bundel *copy* Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011, Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 21 Januari 2011;
134. 6 (enam) lembar *copy* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan;
135. 2 (dua) lembar *copy* Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134/M Tahun 2010 tanggal 16 September 2010 (SK Pengangkatan Sdr, Dr. Ir. Yuswandi A. Temenggung, M.Sc., M.A. sebagai Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri);
136. 2 (dua) lembar *copy* Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89/M Tahun 2014 tanggal 13 Juni 2014 (SK Pengangkatan Sdr, Dr. Ir. Yuswandi A. Temenggung, M.Sc., M.A., sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri);
137. 2 (dua) lembar *copy* Petikan Menteri Dalam

Hal. 23 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 821.22-514 Tahun 2004 tanggal 29 Juni 2004 (SK Pengangkatan Sdr, Dr. Ir. Yuswandi A. Temenggung, M.Sc., M.A., sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran pada Sekretariat Jendral Departemen Dalam Negeri);

138. 2 (dua) lembar *copy* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan;

139. 1 (satu) bundel *copy* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

140. 1 (satu) bundel *copy* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2011 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

141. 1 (satu) bundel *copy* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

142. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian/Kontrak Kerja tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 antara Kementerian Dalam Negeri RI dan PT. Utama Karya (Persero), Nomor Kontrak 011/1075/PAKPA/IX/2011 tanggal 23 September 2011;

143. 1 (satu) bundel asli Perjanjian/Kontrak Kerja tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011, antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT. Utama Karya (Persero) Nomor Kontrak - 11/1075/PAKPA/IX/2011, tanggal 23 September 2011;

Hal. 24 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian/Kontrak Kerja tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT. Utama Karya (Persero) Nomor Kontrak 11/1075/PAKPA/IX/2011 tanggal 23 September 2011;
145. 1 (satu) bundel *copy* Pekerjaan Tambah Kurang *Contract Change Order* (C.C.O) Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011;
146. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian/Kontrak Kerja tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT. Utama Karya (Persero) dengan Nomor Kontrak 011/1075/PAKPA/IX/2011 tanggal 23 September 2011 yang pada pasal 18 memuat sanksi dimana pada poin (2) Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka atas keterlambatan ini Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1 %0 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5 % (lima per seratus) dari nilai kontrak;
147. 3 (tiga) lembar *copy* *Addendum* Perjanjian/Kontrak Kerja tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatra Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 antara Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT. Utama Karya (Persero), Nomor Kontrak 011/1682/PAKPA/XII/2011, tanggal 7 Desember 2011;
148. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen IPDN

Hal. 25 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampus Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011 yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Kontrak (Perjanjian/Kontrak Kerja tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT. Utama Karya (Persero) Nomor Kontrak 011/1075/PAKPA/IX/2011 tanggal 23 September 2011;
- b. 1 (satu) bundel *copy* Permohonan Pembayaran dari PT. Utama Karya yang terdiri dari:
 - aa. 1 (satu) bundel *copy* Surat Nomor KH.D/R.2230/DIV.C/343 tanggal 14 Desember 2011 perihal: Pembayaran Tahap Keempat Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat TA 2011;
 - bb. 2 (dua) bundel *copy* Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 027/2078/PAKPAK/IX/2011 Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011;
- c. 1 (satu) bundel *copy* Daftar Jasa Konsultansi (Daftar Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Bukittinggi Tahun Anggaran 2011;
- d. 1 (satu) bundel *copy* Persetujuan Penetapan Menteri Dalam Negeri Perihal Penetapan Pemenang (Surat Nomor 011/3438/SJ tanggal 13 September 2011 Perihal: Persetujuan Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat;
- e. 1 (satu) bundel *copy* Pengumuman Pemenang Lelang (Pengumuman Pemenang Nomor 229/Peng/P3/KK/KDN/IX/2011 tanggal 13 September 2011

Hal. 26 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011;

- f. 1 (satu) bundel *copy* SK Penetapan Panitia Lelang (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 027-129 Tahun 2011 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011;
149. 2 (dua) lembar *copy* Dokumen Dasar Penetapan Kontrak Lumpsum;
150. 3 (tiga) lembar *copy* Dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor 0001/010-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009;
151. 16 (enam belas) lembar *copy* Dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor 2863/010-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010;
152. 1 (satu) map kuning KABITA dengan tulisan "Baru" pada sudut atas kanan dan kiri serta berjudul "Perencana Sumatera Barat (Ulang) 2011
153. 1 (satu) map kuning KABITA dengan tulisan "Lama" pada sudut atas kanan dan kiri serta berjudul "Perencana Sumatera Barat 2011;
154. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelelangan Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat (berita acara) yang lembar pertamanya berupa Surat Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal Kemendagri Nomor 027/420/PAKPANII/2011 tanggal 6 Juli 2011 Hal Penunjukan

Hal. 27 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi
Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi
Sumatera Barat;

155. 1 (satu) lembar *copy* Dokumen 7,
Perhitungan Kemampuan Dasar Perusahaan (KD) dan Sisa
Kemampuan Paket (SKP);
156. 1 (satu) lembar *copy* Perhitungan SKK, SKP
dan KD, PT. Nindya Karya (Persero);
157. 2 (dua) lembar *copy* Formulir Isian
Perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan Sisa
Kemampuan Paket (SKP) Penyedia Jasa Kualifikasi, PT. Wijaya
Karya (Persero) Tbk;
158. 3 (tiga) lembar *copy* Daftar Sisa
Kemampuan Nyata (SKN), SKK, & KD Jasa Pemborongan, PT. Adhi
Karya (Persero) Tbk;
159. 4 (empat) lembar *copy* Dokumen
Prakualifikasi, Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), PT.
Waskita Karya (Persero);
160. 2 (dua) lembar *copy* Perhitungan SKK, SKP
& KO, PT. PP (Persero) Tbk;
161. 1 (satu) lembar *copy* Surat Nomor
011/2153/SJ tanggal 9 Juni 2011 perihal Permintaan Pendampingan
Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampus
IPDN;
162. 1 (satu) lembar *copy* Surat S-311/04/1/2011
tanggal 12 Juli 2011 Hal *Reviu* dan Supervisi atas Pengadaan
Barang dan Jasa dan 1 (satu) lembar lampiran Surat Tugas Nomor
ST-415/04.01/2010 tanggal 12 Juli 2011;

Hal. 28 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 2 (dua) lembar *copy* Surat Nomor S-484/04.1/2011 tanggal 3 Agustus 2011, hal Reviu dan Supervisi Pengadaan Barang dan Jasa;
164. 1 (satu) bundel Dokumen dalam map berwarna kuning berisikan:
- a. 1 (satu) bundel Dokumen berisikan:
1. 2 (dua) lembar *copy* Dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-829 tahun 2009 tentang Lokasi Pembangunan Kampus IPDN di Daerah;
 2. 2 (dua) lembar *copy* Dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 425.12-22 tahun 2009 tentang Lokasi Kampus IPDN Daerah;
 3. 2 (dua) lembar *copy* Dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 011-496 tahun 2009 tentang Penunjukkan Unit Kerja Pelaksana Pembangunan Kampus IPDN Daerah di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 4. 1 (satu) lembar *copy* Dokumen Nota Dinas Nomor 051/149/PAKPA/XII/09 perihal Laporan Hasil Survey Lokasi Rencana Pembangunan IPDN dan Net Konsep Surat Sekretaris Jenderal Depdagri Kepada Para Gubernur di Empat Provinsi Perihal Pemberitahuan Lokasi Pembangunan Kampus IPDN di tingkat kabupaten;
 5. 1 (bundel) *copy* Dokumen Laporan Survey Lokasi Pembangunan IPDN Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
- b. 1 (satu) bundel Dokumen di *clip* berisikan:
1. 2 (dua) lembar *copy* Dokumen Surat Nomor S-370/04/01/2011 perihal Hasil Review Proses Pengadaan Gedung Kampus IPDN pada 4 lokasi di Daerah Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Agustus 2011
 2. 5 (lima) lembar *copy* Dokumen Penjelasan Panitia terkait Proses

Hal. 29 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Khususnya Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di 3 Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat) Tahun Anggaran 2011;

3. 2 (dua) lembar *copy* Dokumen Nota Dinas Nomor 21/ND/KK/KDN/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Laporan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di 4 Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat dan Riau) Tahun Anggaran 2011;
4. 1 (satu) lembar *copy* Dokumen Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran Atas Tambahan Persyaratan SBU Gred - 7 tanggal 8 September 2011 yang ditandatangani oleh Dudy Jocom;
5. 4 (empat) lembar *copy* Dokumen Nota Dinas Nomor 692/SJ/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Penjelasan Hasil Reviu Proses Pengadaan Gedung Kampus IPDN di 4 Daerah Tahun Anggaran 2011 oleh BPKP;
- c. 10 (sepuluh) lembar *copy* Dokumen Laporan BPKP Nomor LAP-506/04.01/2011 laporan Hasil *Reviu* Proses Pengadaan Gedung Kampus IPDN pada empat lokasi di Daerah Tahun Anggaran 2011 tanggal 19 Agustus 2011;
165. 9 (sembilan) lembar fotokopi Simpulan Hasil Reviu dan Supervisi atas Proses Pengadaan Gedung Kampus IPDN pada empat lokasi di Daerah Tahun Anggaran 2011, Lampiran Surat Nomor S-(kosong)/04/0112011 tanggal (kosong) Agustus 2011;
166. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen terkait Kegiatan *Rivi* Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN pada empat lokasi di daerah Tahun Anggaran 2011, dimana diantaranya terdapat:
 1. Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 011/2153/SJ

Hal. 30 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permintaan Pendampingan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampus IPDN, tanggal 9 Juni 2011, ditujukan kepada Kepala BPKP cq. Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraeni;

2. Fotokopi Surat Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Nomor S-311/D4/1/2011 tanggal 12 Juli 2011, perihal: *Reviu* dan Supervisi atas Pengadaan Barang dan Jasa, serta Surat Tugas Nomor ST-415/D4.01/2010 tanggal 12 Juli 2011;
3. Fotokopi Surat Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Nomor S-484/D4/1/2011 tanggal 3 Agustus 2011, perihal: *Reviu* dan Supervisi atas Pengadaan Barang dan Jasa, serta Surat Tugas Nomor ST-483/D4.01/2010 tanggal 3 Agustus 2011;
4. Fotokopi Kertas Kerja Evaluasi BPKP, Daftar Perbandingan Pekerjaan, kegiatan Pembangunan Gedung Kampus Baso IPDN Sumbar Tahun Anggaran 2011, dibuat oleh M. Rofiq, direview oleh: Marselina Tetty S;
167. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat PT. Bina Karya (Persero);
168. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat PT. Bina Karya (Persero);
169. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen *Bill of Quantity*, Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, PT. Bina Karya (Persero);
170. 1 (satu) bundel *copy Bill Of Quantity* (SQ) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

Hal. 31 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) bundel *copy* Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
172. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
173. 1 (satu) bundel *copy* Gambar Perencanaan Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat PT. Bina Karya (Persero);
174. 1 (satu) budel *As Build Drawing* Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011;
175. 1 (satu) bundel *copy Cut Off* - Karya Rampung bulan Oktober 2012 Proyek Kampus IPDN Baso - Sumatera Barat PT. Utama Karya;
176. 1 (satu) bundel *copy Cut Off* - Karya Rampung bulan Agustus 2013 Proyek IPDN Baso - Sumatera Barat PT. Utama Karya;
177. 1 (satu) bundel Dokumentasi Foto Nama Proyek Pembangunan Kampus IPDN -Baso Periode Desember 2011 sampai dengan Maret 2012;
178. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun 2011;
179. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke I Periode 23 September sampai dengan 27 Oktober 2011, Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Tahun Anggaran 2011;
180. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke II Periode 28 Oktober sampai dengan 1 Desember 2011, Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Tahun Anggaran 2011;
181. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke III Periode 2 Desember sampai dengan 29 Desember 2011, Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Tahun Anggaran 2011;
182. 1 (satu) bundel *copy* laporan Mingguan Minggu ke 7 (tujuh) tanggal 4 November sampai dengan 10 November 2011 Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Kecamatan Baso - Kabupaten Agam, Utama Karya (Persero) Divisi Gedung, arsitek team

Hal. 32 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat;

183. 1 (satu) buah asli buku Laporan Mingguan ke 8 Periode 11 November sampai dengan 17 November 2011 Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011;
184. 1 (satu) bundel *copy* laporan Mingguan Minggu ke 9 (sembilan) tanggal 18 November sampai dengan 24 November 2011 Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Kecamatan Baso - Kabupaten Agam, Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung, arsitek team empat;
185. 1 (satu) bundel *copy* laporan Mingguan Minggu ke 11 (sebelas) tanggal 2 Desember sampai dengan 8 Desember 2011 Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Kecamatan Baso - Kabupaten Agam, Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung, arsitek team empat.
186. 1 (satu) buah *copy* Buku Laporan Mingguan ke-12 Periode 09 Desember sampai dengan 15 Desember 2011 Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011;
187. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Laporan Akhir *Master Plan* Kampus IPDN Regional Baso Bukit Tinggi Sumatera Barat Desember 2009 LPPM ITB Bandung;
188. 1 (satu) bundel Buku Pembangunan Kampus IPDN 4 Provinsi (Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara) Tahun Anggaran 2011 Kementerian Dalam Negeri Sekretariat Jenderal;
189. 1 (satu) bundel *copy* Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Regional di Kabupaten Agam, Sumatera Barat Tahun Anggaran 2010;
190. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Regional di

Hal. 33 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 PT. Bina Karya (Persero);
191. 1 (satu) bundel copy Laporan Konsepsi Desain Kampus IPDN Baso-Sumatera Barat Tahun 2010 PT. Billitonica Indomatra Consultant;
192. 1 (satu) bundel copy Dokumen Rencana Kerja Dan Syarat (Tahap I) Kampus IPDN Baso-Provinsi Sumatera Barat PT. Billitonica Indomatra Consultant;
193. 1 (satu) bundel copy Dokumen Tahap I (Administrasi & Teknis) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, Jakarta 2 Agustus 2011, PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung;
194. 1 (satu) bundel copy Dokumen Kualifikasi (1-2) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, Jakarta 14 Juni 2011, PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung;
195. 1 (satu) bundel copy Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, Rekaman, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk;
196. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuifikasi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, Buku I, Nindya Karya (Persero);
197. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuifikasi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, Buku II, Nindya Karya (Persero);
198. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuifikasi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, PT. Adhi Karya;
199. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuifikasi Vol. 1 of 2 Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, Rekaman, PT. Waskita Karya (Persero);
200. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuifikasi Vol. 2 of 2 Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, Rekaman, PT. Waskita Karya (Persero);
201. 1 (satu) bundel copy Dokumen Administrasi & Teknis Pembangunan

Hal. 34 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



- Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, Rekaman, PT. Waskita Karya (Persero);
202. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, Rekaman, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk;
203. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Pembangunan: Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat DIPA APBN Tahun Anggaran 2011, PT. PP (Persero) Tbk - Cabang IX;
204. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pembangunan: Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumbang DIPA APBN Tahun Anggaran 2011, PT. PP (Persero) Tbk - Cabang IX;
205. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Prakuilifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Nomor 018/PRA/KK/KDN/111/2011 tanggal 28 Maret 2011, Paket Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, Kegiatan: *Review Desain* dan Pengawasan Berkala, Sumber Dana: DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tahun Anggaran 2011;
206. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Prakuilifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Bina Karya (Persero);
207. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Prakuilifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Kampus IPDN Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011 PT. Bina Karya (Persero);
208. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Indomas Mulia;
209. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat April 2011, PT. Indah Karya (Persero);
210. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Administrasi dan Teknis

Hal. 35 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung IPDN di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Yodya Karya (Persero);

211. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Prakuifikasi Pekerjaan: Perencanaa Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Rekayasapratama Grhayasaciptaloka;
212. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat *Review* Desain dan Pengawasan Berkala Tahun Anggaran 2011, Arkonin;
213. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Prakuifikasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat *Review* Desain dan Pengawasan Berkala Tahun Anggaran 2011, Arkonin;
214. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Prakuifikasi Pekerjaan: Perencanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011, PT. Cakra Manggilingan Jaya;
215. 1 (satu) bundel *copy* Data Administrasi Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Indomas Mulya;
216. 1 (satu) bundel *copy* Data Teknis Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Indomas Mulya;
217. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011 PT. Bina Karya (Persero);
218. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Administrasi Dan Penawaran Teknis Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011 PT. Bina Karya (Persero);
219. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Proposal Teknis Pengadaan Jasa

Hal. 36 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011 PT. Bina Karya (Persero);

220. 1 (satu) bundel *copy* Kontrak Nomor Kontrak 011/420/PAKPANII/2011 tanggal 6 Juli 2011 untuk Jasa Konsultasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam antara Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 dan PT. Bina Karya (persero);

221. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Tagihan/Pencairan PT. Bina Karya Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencana Pembangunan Gedung IPDN Kampus Provinsi Sumatra Barat Tahun Anggaran 2011;

222. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Prakuafifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, Arkitek Team Empat;

223. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Prakuafifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Kabupaten Agam, Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Bitu Enarcon Engineering;

224. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Prakuafifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Rancang Persada;

225. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Prakuafifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Yodya Karya (Persero);

226. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Prakuafifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Gubahlaras;

Hal. 37 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



227. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, Gubahlaras;
228. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Kegiatan: Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Wahanacipta Bangunwisma;
229. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Prakuilifikasi Kegiatan: Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Wahanacipta Bangunwisma;
230. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Rancang Persada;
231. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Administrasi & Teknis Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat 2011, PT. Ciriajasa Cipta Mandiri;
232. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Prakuilifikasi Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat 2011, PT. Ciriajasa Cipta Mandiri;
233. 1 (satu) bundel Dokumen asli Perjanjian/Kontrak Kerja tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT. Arkitek Team Empat Nomor 011/22/PAKPANI/201 tanggal 6 Juni 2011;
234. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian / Kontrak Kerja tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 antara Kementerian Dalam Negeri RI dan PT. Arkitek Team

Hal. 38 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat, Nomor Kontrak 011/22/PAKPANI/2011 tanggal 6 Juni 2011;

235. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Tagihan/Pencairan PT. Arkitek Team Empat Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung IPDN Kampus Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011;
236. 1 (satu) *copy* Surat Perjanjian Pembedaan Nomor HK-DG/A.2343/SPP/295 tanggal 4 Oktober 2011 Pekerjaan Infrastruktur Area Perpustakaan & Poliklinik antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Yulian Berkah Abadi untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat;
237. 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Pembedaan Nomor HK-DG/A.2085/SPP/240 tanggal 8 September 2011, Pekerjaan Infrastruktur Area Asrama antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan CV. Prima Karya Sentosa untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat;
238. 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Pembedaan Nomor HK-DG/A.2344/SPP/ 296 tanggal 4 Oktober 2011, Pekerjaan Infrastruktur Area Menza antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan CV. Prima Karya Sentosa untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat;
239. 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Pembedaan Nomor HK-DG/A.2101/SPP/ 245 tanggal 14 Oktober 2011, Pekerjaan Infrastruktur Area Auditorium antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan CV. Prima Karya Sentosa untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat;
240. 1 (satu) bundel *copy* Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & Nomor Dok: BBK W 4664 kepada CV. Prima Karya Sentosa sejumlah 524,000,000 tanggal 16 November 2011;
241. 1 (satu) bundel *copy* Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & Nomor Dok: BBK W 5278 kepada CV. Prima Karya Sentosa sejumlah 2,000,000,000 tanggal 27 Desember 2011;
242. 1 (satu) bundel *print out* Rekening Koran Bank Bukopin atas nama

Hal. 39 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husain Redwin Nurlette Nomor Rekening 0102038969 periode Desember 2011 sampai dengan Juni 2012;

243. 1 (satu) lembar *copy* Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-320/WPJ.04/KP.0903/ 2015, Nama CV. Restu Kreasi Mandiri, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.143.028.5-016.000;
244. 1 (satu) lembar *copy* Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-02581/WPJ.04/KP.0903/2009, Nama CV. Restu Kreasi Mandiri, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.143.028.5-016.000;
245. 1 (satu) lembar *copy* Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil Nomor 01431/1.824.51, Nama Perusahaan CV. Restu Kreasi Mandiri;
246. 1 (satu) bundel *copy* Akta Perseroan Komanditer "CV. Restu Kreasi Mandiri", Nomor 15, tanggal 7 September 2005;
247. 2 (dua) lembar *copy* Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kepada Nur Wahid, S.T., sejumlah uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk penerimaan, dengan rincian sebagai berikut: Perintisan Proyek IPDN Bukit Tinggi tanggal 03/05/2011;
248. 1 (satu) *copy* Surat Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/A.1987/SPP/214 tanggal 26 Oktober 2011 Pekerjaan Patung IPDN antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan Y Sumartono, S.Sn., untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011;
249. 1 (satu) bundel *copy* Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & Nomor Dok: BBK W 42911 kepada J. Sumartono S.SN., sejumlah Rp42.484.000,00 tanggal 8 November 2011;
250. 1 (satu) bundel *copy* Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & Nomor Dok: W 3300 kepada Sumartono sejumlah Rp31.863.000,00 tanggal 28-Mei-12;
251. 1 (satu) bundel *copy* Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & Nomor Dok: BBK W 4418 kepada Muslim sejumlah Rp17.150.000,00 tanggal 11-Nov-11;

Hal. 40 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. 1 (satu) bundel *copy* Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode Kas/Bank H 45 kepada Muslim sejumlah Rp40.002.240,00 tanggal Jan-13;
253. 1 (satu) bundel *copy* sesuai asli Dokumen Surat Perjanjian Jual Beli Nomor HK.DG/A.2047/SPP/235, tanggal 15 November 2011, Pekerjaan Jual Beli Material Rangka Baja antara PT. Utama Karya (Persero) dengan PT. Sinarindo Megah Perkasa untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011;
254. 1 (satu) bundel *copy* sesuai asli Dokumen Addendum-I Surat Perjanjian Jual Beli Nomor HK.DG/A.2047/SPP-ADD 1/235, tanggal 15 Desember 2011, Pekerjaan Jual Beli Materail Rangka Baja antara PT. Utama Karya (Persero) dengan PT. Sinarindo Megah Perkasa untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011;
255. 1 (satu) bundel *copy* sesuai asli Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/A.2048/SPP/236, tanggal 16 November 2011, Pekerjaan Rangka Atap Baja antara PT. Utama Karya (Persero) dengan PT. Sinarindo Megah Perkasa untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011;
256. 1 (satu) bundel *copy* sesuai asli Dokumen Addendum-I Surat Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/A.2048/SPP-ADD 1/236, tanggal 15 Desember 2011, Pekerjaan Rangka Atap Baja antara PT. Utama Karya (Persero) dengan PT. Sinarindo Megah Perkasa untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011;
257. 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 004/HK-IPDN.BT/FES/SPMK/XI/2011 tanggal 15-Nov-11;
258. 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 005/HK-IPDN.BT/FES/SPMK/XI/2011 tanggal 15-Nov-11;
259. 2 (dua) lembar *copy* sesuai asli Berita Acara

Hal. 41 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan Rangka Atap Baja PT. Sinarindo Megah Perkasa pada Proyek IPDN Provinsi Sumatera Barat tanggal 4 Mei 2012;

260. 1 (satu) bundel *copy* sesuai asli Dokumen Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Rangka Baja Atap;
261. 1 (satu) bundel Rekap Pembayaran Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Baja Sinarindo Megah Perkasa, PT;
262. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Dokumen Rekening Koran Pinjaman Bank Mandiri atas nama PT. Sinarindo Megah Perkasa Nomor Rekening 60102003468 periode:
 - a. 1/11/11 sampai dengan 30/11/11;
 - b. 1/12/11 sampai dengan 30/12/11;
 - c. 1/01/12 sampai dengan 31/01/12;
 - d. 1/02/12 sampai dengan 29/02/12;
 - e. 1/10/12 sampai dengan 31/10/12;
 - f. 1/02/13 sampai dengan 28/02/13;
 - g. 1/05/13 sampai dengan 31/05/13
 - h. 1/06/13 sampai dengan 30/06/13;
 - i. 1/08/13 sampai dengan 31/08/13;
 - j. 1/03/14 sampai dengan 31/03/14;
 - k. 1/04/14 sampai dengan 30/04/14;
 - l. 1/07/14 sampai dengan 31/07/14;
263. 1 (satu) bundel *copy* Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & Nomor Dok: BBK: B 2496 kepada PT. Sinarindo Megah Perkasa sejumlah 75.000.000 tanggal Juli 2014;
264. 1 (satu) bundel *copy* Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & Nomor Dok: W 1040 kepada PT. Sinarindo Megah Perkasa sejumlah Rp186.083.937,00 tanggal 20-Feb-12;
265. 1 (satu) *copy* Surat Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/A.151/SPP/013 tanggal 17 Januari 2012 Pekerjaan GRC antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Gatrindo Jaya Abadi untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi

Hal. 42 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat;

266. 1 (satu) copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/A.256/SPP/016 tanggal 2 Februari 2012 Pekerjaan Rangka Baja Gerbang antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Gatrindo Jaya Abadi untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat;
267. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & Nomor Dok: W 4240 kepada PT. Gatrindo Jaya Abadi sejumlah Rp99.012.509,00 tanggal 26-Jul-12;
268. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & Nomor Dok: BBK W 2624 kepada PT. Gatrindo Jaya Abadi sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 25 April 2012;
269. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & Nomor Dok: BBK: W 4540 kepada CV. Karya Jaya sejumlah 24.572.955 tanggal 09-Agust-12;
270. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & Nomor Dok: BBK 2842 kepada CV. Bimantara Utama sejumlah 9,151,509 tanggal 21 Mei 2012;
271. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & Nomor Dok: W 3776 kepada PT. Arunggatra Cakrawala sejumlah Rp44.670.000,00 tanggal ... Mei 2012;
272. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & Nomor Dok: BBK W (tidak jelas) kepada CV. Dua Putra Mandiri sejumlah 25,000,000 tanggal 24 September 2012;
273. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode Nomor Dok: B 124 kepada CV. Duta Putra Mandiri sejumlah 36.218.287 tanggal 03-Des-12;
274. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode Nomor Dok: B 126 kepada CV. Duta Putra Mandiri sejumlah 107.805.793 tanggal 03-Des-12;
275. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor DN 2463 2012, untuk 60 - Divisi Gedung, dari: 00 - Kantor Pusat, tanggal 25 - 05 - 2012, BNI 1116,

Hal. 43 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Suplier JT. PT. Mandiri Unggul Pro Gd IPDN Sumbar DGD,
jumlah Rp404.308.197,00;

276. 1 (satu) bundel asli Dokumen Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/St.1893/SPP/203 tanggal 11 Oktober 2011 Pekerjaan Elektrikal Antara PT. Hutama Karya Divisi Gedung dengan PT. Indah Yamamitra Persada untuk Proyek IPDN Bukittinggi;
277. 1 (satu) bundel *copy Addendum* - I Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/St.2091/SPP-ADD-I/225 tanggal 14 Desember 2011 Pekerjaan Elektronik antara PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Indah Yamamitra Persada untuk Proyek IPDN Bukit Tinggi;
278. 1 (satu) *copy* Surat Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/St.2091/SPP/225 tanggal 10 November 2011 Pekerjaan Elektronik antara PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Indah Yamamitra Persada untuk Proyek IPDN Bukit Tinggi;
279. 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/A.2048/SPP/236 tanggal 16 Oktober 2011, Pekerjaan Rangka Atap Baja antara PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Sinarindo Megah Perkasa untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011;
280. 1 (satu) bundel *copy Addendum* - I Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/St.1893/SPP-ADD-I/203 tanggal 14 Desember 2011 Pekerjaan Elektrikal antara PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Indah Yamamitra Persada untuk Proyek IPDN Bukit Tinggi;
281. 1 (satu) bundel *copy* Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Kode & Nomor Dok: BBK W 4287 kepada PT. Indah Yamamitra Persada sejumlah Rp866.700.000,00 tanggal 8 November 2011;
282. 1 (satu) bundel *copy Check List* Pembayaran Suplier/Sub.Kont/Sewa Alat (*), Nama Karya IPDN - Buting, Nama Rekanan: PT. Iyada, Jenis Pekerjaan: Elektrikal;
283. 1 (satu) bundel *copy Routing* Pencairan KMK Bank BTN Cabang Cawang, Patriapark kepada PT. Indah Yamamitra Persada sebesar

Hal. 44 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



968,417,501;

284. 1 (satu) bundel *copy* Nota Nomor DN 1738 2012, untuk: 60 - Divisi Gedung, dari: 00 - Kantor Pusat, tanggal 18 - 04 - 2012, Keterangan BTN 1116, PT. Yamamitra Persada, Pro Gedung IPDN Sumbar Kab Agam, DGD, jumlah Rp300,620,444,00;
285. 1 (satu) bundel *copy* Nota Nomor ON 3737 2012, untuk: 60 - Divisi Gedung, dari: 00 - Kantor Pusat, tanggal 04 - 07 - 2012, BTN 1116, PT. Indah Yamamitra Persada, JT.KS.Pro Gedung Kampus IPDN Bukit Tinggi, jumlah Rp1.587.992.193,00;
286. 1 (satu) bundel *copy* Berita Acara Serah Terima - I Proyek Pembangunan IPDN Sumatera Barat, Pekerjaan Elektrikal Sub-Kontraktor PT. Indah Yamamitra Persada tanggal 30 Desember 2011 beserta lampiran (Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/St.1893/SPP/203 tanggal 11 Oktober 2011, Addendum - I Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/St.1893/SPP-ADD-I/203 tanggal 14 Desember 2011 dan Addendum - II Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/St.1893/SPP-ADD-111203 tanggal 16 Desember 2011);
287. 1 (satu) bundel *copy* Berita Acara Serah Terima - I Proyek Pembangunan IPDN Sumatera Barat, Pekerjaan: Elektronik Sub-Kontraktor PT. Indah Yamamitra Persada tanggal 30 Desember 2011 beserta lampiran (Surat Nomor 063/SP2K/JKC.I/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 Perihal: Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K), Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/St.2091/SPP/225 tanggal 10 November 2011, Addendum - I Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/St.2091/SPP- ADD-I/225 tanggal 14 Desember 2011);
288. 3 (tiga) lembar *copy* Surat Nomor 056/SP2K/JKC.I/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 Perihal: Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K);
289. 1 (satu) lembar *copy* Surat Nomor 840/JKC.I/HCLU/IV/2012 tanggal 11 April 2012 Perihal: Rincian Transaksi Pencairan KMK atas nama PT. Indah Yamamitra Persada;
290. 1 (satu) lembar *copy* Surat Nomor 1179/JKC.I/HCLUN/2012 tanggal 14

Hal. 45 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 Perihal: Rincian Transaksi Pencairan KMK atas nama PT. Indah Yamamitra Persada;

291. 2 (dua) lembar *copy* Surat Nomor 261/JKC.I/HCLU/11/2012 tanggal 3 Februari 2012 Perihal: Rincian Transaksi Pencairan KMK atas nama PT. Indah Yamamitra Persada;

292. 1 (satu) bundel *copy* Rekening Koran Giro Bank BTN A/C. Nomor 00241-01-30-000187-7 atas nama PT. Indah Yamamitra Persada dengan rincian sebagai berikut:

- Periode 1 Jan 12 - 31 Jan 12;
- Periode 1 Feb 12 - 29 Feb 12;
- Periode 1 Mar 12 - 31 Mar 12;
- Periode 1 Apr 12 - 30 Apr 12;
- Periode 1 May 12 - 31 May 12;
- Periode 1 Jul 12 - 31 Jul 12;
- Periode 1 Aug 12 - 31 Aug 12;
- Periode 1 Sep 12 - 30 Sep 12;
- Periode 1/10/12 - 1/10/12;
- Periode 1 Nov 12 - 30 Nov 12;
- Periode 1 Des 12 - 31 Des 12;

293. 1 (satu) bundel *copy* Rekening Koran Bank Mandiri Syariah A/C Nomor 7045020155 atas nama Indo Dayasurya Persada PT, Periode 1 November sampai dengan 30 November 2012 dan Periode 1 Desember 2012;

294. 1 (satu) bundel *copy* Rekening Koran Giro Bank BTN A/C Nomor 00241-01-30-000187-7 atas nama PT. Indah Yamamitra Persada dengan rincian sebagai berikut:

- Periode 1 Jan 11 - 31 Jan 11;
- Periode 1 Feb 11 - 28 Feb 11;
- Periode 1 Mar 11 - 31 Mar 11;
- Periode 1 Apr 11 - 30 Apr 11;
- Periode 1 May 11 - 31 May 11;
- Periode 1 Jun 11 - 31 Jun11;

Hal. 46 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode 1 Jul 11 - 31 Jul 11;
- Periode (tidak jelas);
- Periode 1 Sep 11 - 30 Sep 11;
- Periode 1 Okt 11 - 31 Okt 11;
- Periode 1 Nov 11 - 30 Nov 11;
- Periode 1 Des 11 - 31 Des 11;

295. 1 (satu) bundel *copy* Rekening Giro Bank BNI A/C Nomor 0014143262

atas nama Indah Yamamitra Pers** dengan rincian sebagai berikut:

- Periode 1/01/2011 sampai dengan 31/01/2011;
- Periode 1/02/2011 sampai dengan 28/02/2011;
- Periode 1/03/2011 sampai dengan 31/03/2011;
- Periode 1/04/2011 sampai dengan 30/04/2011;
- Periode 1/05/2011 sampai dengan 31/05/2011;
- Periode 1/06/2011 sampai dengan 30/06/2011;
- Periode 1/07/2011 sampai dengan 31/07/2011;
- Periode 1/08/2011 sampai dengan 31/08/2011;
- Periode 1/09/2011 sampai dengan 30/09/2011;
- Periode 1/10/2011 sampai dengan 31/10/2011;
- Periode 1/11/2011 sampai dengan 30/11/2011;
- Periode 1/12/2011 sampai dengan 31/12/2011;

296. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Nomor 013-IYD/HK/03/12 tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp723.265.884,00 untuk pembayaran: Tagihan ke-3 *Progress* ke-2 sebesar 75,8461% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektronik sesuai Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/St.2091/SPP/225 tanggal 10 November 2011 dari nilai kontrak Rp2.805.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (*Invoice* dan Faktur Pajak) dan 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Nomor 003-

Hal. 47 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- IYD/HK/01/12 tanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp978.720.600,00;
297. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Nomor 052-IYD/HK/XI/11 tanggal 11 November 2011 sebesar Rp420.750.000,00 untuk pembayaran: Tagihan ke-1 uang muka sebesar 15% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektronik sesuai Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/St.2091/SPP/225 tanggal 10 November 2011 dari nilai kontrak Rp2.805.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (*Invoice* dan Faktur Pajak);
298. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Nomor 017-IYD/HK/04/12 tanggal 11 April 2012 sebesar Rp225.003.636,00 untuk pembayaran: Tagihan ke-4 sebesar 85,8730% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektronik sesuai Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/St.2091/SPP/225 tanggal 10 November 2011 dari nilai kontrak Rp2.805.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (*Invoice* dan Faktur Pajak);
299. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Nomor 059-IYD/HK/09/12 tanggal 24 September 2012 sebesar Rp317.009.880,00 untuk pembayaran: Tagihan ke-5 sebesar 100% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektronik sesuai Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/St.2091/SPP/225 tanggal 10 November 2011 dari nilai kontrak Rp2.805.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (*Invoice* dan Faktur Pajak);
300. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Nomor 048-IYD/HK/XI/11 tanggal 3 November 2011 sebesar Rp891.000.000,00 untuk pembayaran: Tagihan ke-1 uang muka sebesar 10% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektrikal sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor H-KDG/St.1814/SPK/64 tanggal 11 Oktober 2011 dan Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/St.1893/SPP/203 tanggal 11 Oktober 2011 dari nilai kontrak Rp8.910.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (*Invoice* dan Faktur Pajak);
301. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Nomor 058-IYD/HK/XII/11 tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp816.809.549,00 untuk pembayaran: Tagihan ke-2 *progress* ke-1 sebesar 10,7851% Proyek IPDN Bukit Tinggi

Hal. 48 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Elektrikal sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor HKDG/St.1814/SPK/64 tanggal 11 Oktober 2011 dan Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/St.1893/SPP/203 tanggal 11 Oktober 2011 dari nilai kontrak Rp8.910.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (*Invoice* dan Faktur Pajak);

302. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Nomor 002-IYD/HK/01/12 tanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp3.306.824.879,00 untuk pembayaran: Tagihan ke-3 *progress* ke-2 sebesar 54,4482% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektrikal sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor HKDG/St.1814/SPK/64 tanggal 11 Oktober 2011 dan Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/St.1893/SPP/203 tanggal 11 Oktober 2011 dari nilai kontrak Rp8.910.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (*Invoice* dan Faktur Pajak);

303. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Nomor 012-IYD/HK/03/12 tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp1.007.550.007,00 untuk pembayaran: Tagihan ke-4 *progress* ke-3 sebesar 68,6761 % Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektrikal sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor HKDG/St.1814/SPK/64 tanggal 11 Oktober 2011 dan Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/St.1893/SPP/203 tanggal 11 Oktober 2011 dari nilai kontrak Rp8.910.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (*Invoice* dan Faktur Pajak);

304. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Nomor 016-IYD/HK/04/12 tanggal 11 April 2012 sebesar Rp770.565.758,00 untuk pembayaran: Tagihan ke-5 *progress* ke-4 sebesar 78,8506% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektrikal sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor HKDG/St.1814/SPK/64 tanggal 11 Oktober 2011 dan Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/St.1893/SPP/203 tanggal 11 Oktober 2011 dari nilai kontrak Rp8.910.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (*Invoice* dan Faktur Pajak);

305. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Nomor 058-IYD/HK/09/12 tanggal 24 September 2012 sebesar Rp870.250.045,00 untuk pembayaran: Tagihan ke-6 *progress* ke-5 sebesar 100% Proyek IPDN Bukit Tinggi

Hal. 49 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Elektrikal sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor HKDG/St.1814/SPK/64 tanggal 11 Oktober 2011 dan Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/St.1893/SPP/203 tanggal 11 Oktober 2011 beserta *Addendumnya* dari nilai kontrak Rp8.140.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (*Invoice* dan Faktur Pajak);

306. 1 (satu) bundel *copy* Akta Perseroan Terbatas PT. Indah Yamamitra Persada, tanggal 24 - 6 - 2002, Nomor 96;
307. 1 (satu) lembar *copy* Struktur PT. Indo Dayasurya Persada;
308. 1 (satu) lembar *copy* Perbandingan Hutang PT. Indo Daya Surya Per 26 Mei 2015;
309. 1 (satu) lembar *copy Final Account*, Nama Sub: PT. Indah Yamamitra Persada, Pekerjaan Eletronik;
310. 1 (satu) lembar *copy Final Account*, Nama Sub: PT. Indah Yamamitra Persada, Pekerjaan Elektrikal;
311. 1 (satu) bundel *copy* Surat Nomor HK.DG/Ln.1288/DIV.A/071/2015 tanggal 21 Mei 2015 Perihal Tanggapan Surat beserta lampiran;
312. 1 (satu) bundel *copy Outstanding* (tulisan tangan) *Resume* Tagihan PT. Indo Dayasurya Persada Terhadap PT. Hutama Karya Proyek Pembangunan Gedung Kampus Sumatera Barat Pekerjaan Elektrikal & Elektronik;
313. 1 (satu) bundel *copy* Akta Perseroan terbatas PT. Indah Yamamitra Persada, tanggal 24 - 6 - 2002,- Nomor 96 (lengkap);
314. 1 (satu) bundel asli Dokumen *Adendum-11* Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/St.1893/SPP-ADD-11/203 tanggal 16 Desember 2011 Pekerjaan Elektrikal Antara PT. Hutama Karya Divisi Gedung dengan PT. Indah Yamamitra Persada untuk Proyek IPDN Bukittinggi;
315. 1 (satu) bundel *print out Final Account* Nama Sub: PT. Indah Yamamitra Persada pekerjaan elektrikal yang dibuat oleh bagian Keuangan PT. IYADA atas nama Hendry Filyandi dan Keuangan PT. Hutama Karya atas nama Andri Setyawan;
316. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen SPMK Nomor HKDG/St.1814/SPK/64

Hal. 50 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2011 antara PT. Utama Karya Ir. Budi Rachmat K. GM Divisi Gedung dengan Ir. Sugeng Hindaryo Dirut PT. Yamamitra Persada;

317. 1 (satu) bundel asli Dokumen Penentuan Rekanan Pekerjaan Elektronik IPDN Bukittinggi atas nama PT. Indah Yamamitra Persada tanggal 10 November 2011;
318. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen gambar kontrak pekerjaan elektronik antara PT. Utama Karya dengan PT. Indah Yamamitra Persada untuk pembangunan Gedung Induk Kampus IPDN Baso Sumatera Barat;
319. 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/A.1857/SPP/ 200 tanggal 19 Oktober 2011, Pekerjaan Jasa Pabrikasi, Transportasi & Install Baja antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Surya Baja Jaya untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat;
320. 1 (satu) bundel *copy* Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & Nomor Dok: BBK W 5124 kepada PT. Surya Baja Jaya sejumlah Rp749.187.289,00 tanggal 19 Desember 2011;
321. 1 (satu) bundel *copy* Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & Nomor Dok: W 4241 kepada PT. Surya Baja Jaya sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 26-Jul-12;
322. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban uang masuk dari PT. Utama Karya proyek Pembangunan Kampus IPDN Sumatera Barat;
323. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Tahapan BCA, cabang Pemohon 6600-KCP Bulevard Timur dengan Nomor Rekening 06600284531-Matias Sitorus, tanggal 20/10/2017, Periode 05/2011-12/2011 dan Periode 01/2011-12/2012;
324. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening BNI Taplus Periode tgl 01/05/2011 sampai dengan 31/12/2012 dengan Nomor Rekening 0013499209, kepada Bpk Matias Sitorus Jalan Perdana Nomor 4 Cakung Timur 13910;
325. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dengan Nomor Rekening

Hal. 51 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

577010160811, Cabang 02577 Kantor Rawamangun Periode 1 Januari 2012 - 31 Januari 2012, OCBC NISP, kepada PT. Surya Baja Jaya, Jalan Pegangsaan II Nomor 25 D 1 Pulo Gadung Pegangsaan Dua, Jakarta Utara;

326. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dengan Nomor Rekening 577010160811, Cabang 02577 Kantor Rawamangun Periode 1 Mei 2011 - 31 Mei 2011 OCBC NISP kepada PT. Surya Baja Jaya, Jalan Pegangsaan II Nomor 25 D 1 Pulo Gadung Pegangsaan Dua, Jakarta Utara;

327. 1 (satu) bundel fotokopi Pembayaran dengan RTGS dengan jumlah 2.586.217.971 yang ditandatangani oleh sdr. Ir. Budi Rachmat K., M.M., pada tanggal 27 Oktober 2011;

328. 1 (satu) bundel fotokopi Faktur Pajak dengan Nomor Seri 010.000-11.00020516 dengan pembeli PT. Surya Baja Jaya alamat Jalan Pegangsaan II Nomor 25 D Jakarta Timur dengan NPWP 02.506.604.4-013.000 berikut Kuitansi pembelian material baja;

329. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bukti Pengiriman Barang Nomor SJ/HJ/EXP/073/SBJ/XI, dengan Pengirim PT. Surya Baja Jaya Jalan Pegangsaan II Kav. 25 D Pulo Gadung Jakarta Timur melalui ekspedisi PT. Hinalang Jaya;

330. 1 (satu) bundel fotokopi Kuitansi pengiriman PT. Surya Baja Jaya melalui PT. Hinalang Jaya untuk jasa pengiriman barang;

331. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/A.1620/ SPP/162 tanggal 28 September 2011, Pekerjaan Pintu, Jendela Aluminium antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Jagat Interindo untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat;

332. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & Nomor Dok: BBK W 4839 kepada PT. Jagat Interindo sejumlah Rp588.500.000,00 tanggal 22 November 2011;

333. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor ON 3017 2012, untuk: 60 - Divisi Gedung, dari: 00 - Kantor Pusat, tanggal 05 - 06 - 2012, BTN 1116,

Hal. 52 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pem. Kredit Supplier JT PT. Jagat Interindo, Pry. Kampus IPDN, jumlah Rp95,823,745,00;

334. 1 (satu) lembar *copy* Buku Besar Jagat Interindo periode Januari sampai dengan April 2017 beserta lampirannya berupa *copy* Rekening Koran Jagat Interindo di Bank Ekonomi (No Rek. 0000068456) dan *copy* Buku Harian Bank BTN (No Rek 00241-01-30-000143-7;
335. 1 (satu) lembar *copy* Daftar Tagihan Proyek-Proyek Pekerjaan Alumunium & Interior File Kuitansi Nomor 24 (2011) Status tanggal 25 Februari 2015 beserta lampirannya berupa *copy* Kuitansi;
336. 1 (satu) lembar *copy* Surat PT. Jagat Interindo Nomor 161R2/AL/QP-JI/X/11 tanggal 12 Agustus 2011 hal Penawaran Harga Pekerjaan Pertisi Aluminium & Kaea, Proyek Kampus IPDN Baso Sumbar;
337. 1 (satu) bundel *copy* Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi, Jenis Pekerjaan Pindu, Jendela Alumunium, PT.Jagat Interindo, Proyek IPDN Bukittinggi, tanggal 13 September 2011;
338. 1 (satu) bundel Surat PT. Jagat Interindo Nomor 00017/Fin/Hutama Karya/JI-V/14 tanggal 7 Mei 2014 perihal Penyelesaian *Outstanding Payment*, beserta lampiran berupa Perincian Aging Hutang PT. Utama Karya;
339. 1 (satu) lembar *print out* Jurnal Umum PT. Jagat Interindo JM 1612007, Jurnal Penyesuaian Tahun Anggaran 2016 dengan total 9.906.342.245,00;
340. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli The "H" Tower yang terdiri dari:
- a. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 962/HKR.DU/Ryn./Perj.118/IX/2013;
 - b. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 963/HKR.DU/Ryn./Perj.119/IX/2013;
 - c. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 964/HKR.DU/Ryn./Perj.120/IX/2013;
341. 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Pemborongan Nomor HK- DG/A.2175/SPP/ 255 tanggal 17 November

Hal. 53 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Pekerjaan Pemasangan Baja Gedung Auditorium antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan CV. Sakha Sinergy untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat;

342. 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Jual Beli Nomor HK-DG/A.2084/SPP/239 tanggal 17 November 2011, Jual Beli Material Baja Gedung Auditorium antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan CV. Sakha Sinergy untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011;
343. 1 (satu) bundel *copy* Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & Nomor Dok: BBK W 5126 kepada CV. Skha Sinergy sejumlah Rp713.411.006,00 tanggal 19 Desember 2011;
344. 1 (satu) bundel *copy* Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & Nomor Dok: BBK: W S729 kepada CV. Sakha Sinergy sejumlah 58.152.745 tanggal 24-Sep-12;
345. 1 (satu) bundel Dokumen Permintaan Pembayaran Pekerjaan Jual Beli dan Pemasangan Material Baja Gedung Auditorium Kampus IPDN Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat dengan nomor:
- a. 44/SS.IPDN/XI/2011 tanggal 20 November 2011;
 - b. 45/SS.IPDN/XI/2011 tanggal 20 November 2011;
 - c. 01/SS.IPDN/1/2012 tanggal 20 Januari 2012;
 - d. 02/SS.IPDN/1/2012 tanggal 20 Januari 2012;
 - e. 05/SS.IPDN/11112012 tanggal 9 Maret 2012;
 - f. 06/SS.IPDN/111/2012 tanggal 9 Maret 2012.
 - g. 42/SS.IPDNNII/2012 tanggal 31 Juli 2012;
 - h. 43/SS.IPDNNII/2012 tanggal 31 Juli 2012.
346. 1 (satu) lembar *print out* Dokumen berjudul "Daftar Pembayaran Dalam Pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN, Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Anggaran Tahun 2011";
347. 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor 108-00-0609390-1 atas nama

Hal. 54 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliadi periode 1 Januari 2011 sampai dengan 19 September 2017;

348. 1 (satu) bundel Akta Pemasukan Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. Sakha Sinergy", tanggal 31 Oktober 2011, Nomor 61, Penghadap Tn.P. Pasu Pathi, S.Kom.Cs, Notaris Gordon E. Harianja, S.H;
349. 1 (satu) bundel *copy* Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & Nomor Dok: BBK W 5122 kepada PT. Dwijaya Selaras sejumlah Rp447.480.000,00 tanggal 19 Desember 2011;
350. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen *Invoice* PT. Dwijaya Selaras dengan nomor *invoice* INV1111.471 dengan nomor PO HK-DG/St.2159/SPP/2 beserta faktur pajaknya.;
351. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen *Invoice* PT. Dwijaya Selaras dengan nomor *invoice* INV1112.516 dengan nomor PO HK-DG/St.2159/SPP/2 beserta faktur pajaknya;
352. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Dwijaya Selaras dengan nomor rekening 117-00-0216486-1 periode bulan 1/12/11 sampai dengan 31/12/11;
353. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen *Invoice* PT. Dwijaya Selaras dengan nomor *invoice* INV1205.226 dengan nomor PO HK• DG/St.2159/SPP/2 beserta faktur pajaknya, dengan catatan dalam tulisan tangan yang terbaca "Belum Dibayar";
354. 1 (satu) bundel asli Dokumen Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/St.1809/SPP/191 tanggal 11 Oktober 2011 Pekerjaan Mekanikal Antara PT. Utama Karya Divisi Gedung dengan PT. Karya /duta Konsulindo Untuk Proyek IPDN Bukittinggi;
355. 1 (satu) bundel asli Dokumen *Adendum-1* Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/St.1809/SPP-ADD-1/2191 tanggal 12 Desember 2011 Pekerjaan Mekanikal Antara PT. Utama Karya Divisi Gedung dengan PT. Karya Duta Konsolindo untuk Proyek IPDN Bukittinggi;
356. 1 (satu) bundel Dokumen SPMK Nomor HKDG/St.1804/SPK/63 tanggal

Hal. 55 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Oktober 2011 antara PT. Hutama Karya Ir. Budi Rachmat K. GM Divisi Gedung dengan Dirut PT. Duta Konsulindo Ridwan Rasyid;
357. 1 (satu) bundel Dokumen asli *Bill of Quantity* tanggal 27 Oktober 2011 Proyek Kampus IPDN Sumatera Barat Paket Pekerjaan Mekanikal;
358. 1 (satu) bundel asli Dokumen Rekapitulasi *Breakdown VO* (Tambah Kurang) *project* IPDN lokasi Baso Sumatera Barat Pekerjaan Mekanikal dibuat oleh PT. Karya Duta Konsulindo tanggal 11 Oktober 2011 *Project Manager* Yudi Arief;
359. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Pembayaran *Progress* 65.4372% Pekerjaan Mekanikal *Project* IPDN Bukit Tinggi Nomor *Invoice* 010/KDK-IPDN/111/12 Kepada PT. Karya Duta Konsulindo sebesar Rp2.140.622.000,00;
360. 1 (satu) bundel *copy* Nota Nomor DN 3732 2012, untuk: 60 - Divisi Gedung, dari: 00 - Kantor Pusat, tanggal 02 - 07 - 2012, BTN 1116, PT. Karya Duta Konsulindo, JT.KS, Pro.Kampus IPDN Sumbar Kabupaten Agam, jumlah Rp1.887.639.499.00;
361. 1 (satu) bundel *copy* Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Kode & Nomor Dok: BBK W 4449 kepada PT. Karya Duta Konsulindo sejumlah Rp583.150.000,00 tanggal 20;
362. 1 (satu) bundel *copy* Nota Nomor DN 1735 2012, untuk: 60 - Divisi Gedung, dari: 00 - Kantor Pusat, tanggal 17 - 04 - 2012, Keterangan BTN 1116, PT. Karya Duta Konsulindo, Pro Kampus IPDN Sumbar Kabupaten Agam, DGD, jumlah Rp18.535.636,00;
363. 1 (satu) bundel *copy* Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Karya Duta Konsulindo, Nomor 02 (dua), tanggal 31 Januari 2008, Notaris Dian Trianawaty, S.H;
364. 1 (satu) bundel *copy* salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Karya Duta Konsulindo, Nomor 58, tanggal 28 Mei 2014, Notaris Surjadi, S.H., M.Kn., M.M;
365. 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Pemborongan Nomor HK- DG/A.2033/SPP/234 tanggal 10 November 2011, Pekerjaan Kusen Kayu dan Pintu Kayu antara PT. Hutama Karya

Hal. 56 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Divisi Gedung dengan PT. Mondila Bersaudara untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat;

366. 1 (satu) bundel *copy* Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & Nomor Dok: BBK W 4842 kepada Modila Bersaudara sejumlah Rp170.665.000,00 tanggal 07-Dec-11;
367. 1 (satu) bundel *copy* Nota Nomor DN 3029 2012, untuk: 60 - Divisi Gedung, dari: 00 - Kantor Pusat, tanggal 01 - 06 - 2012, Keterangan BTN 1116, Pemby. *Kredit Suplier* JT PT. Modila Bersaudara, Pry. IPDN Sumbar Kab Agam, DGD, jumlah Rp460.276.463,00 dan Nota Nomor DN 3030 2012, untuk: 60 - Divisi Gedung, dari: 00 - Kantor Pusat, tanggal 01 - 06 - 2012, Keterangan BTN 1116, FP Pemby. *Kredit Suplier* JT PT. Modila Bersaudara, Pry. IPDN Sumbar Kabupaten Agam, DGD, jumlah Rp47.451.182,00;
368. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Nomor KW-055/05/2012 Pembayaran *Progress* 95,00% Pengadaan dan Pemasangan Kusen dan Pintu Kayu pada Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat SPP Nomor HK.DG/A.2033/SPP/234 tanggal 10 November 2011 Kepada PT. Medulla Bersaudara sebesar Rp292.299.000,00;
369. 1 (satu) bundel *copy* Nota Nomor ON 3013 2012, untuk: 60 - Divisi Gedung, dari: 00 - Kantor Pusat, tanggal 01 - 06 - 2012, Keterangan BTN 1116, Pembayaran *Kredit Suplier* JT PT. Modila Bersaudara, Pry. Kampus IPDN, jumlah Rp328.769.155,00 dan 1 (satu) bundel *copy* Nota Nomor DN 3014 2012, untuk: 60 - Divisi Gedung, dari: 00 - Kantor Pusat, tanggal 01 - 06 - 2012, Keterangan BTN 1116, FP Pembayaran *Kredit Suplier* JT PT. Modila Bersaudara, Pry. Kampus IPDN, jumlah Rp33.893.727,00;
370. 1 (satu) bundel Risalah Penawaran Harga Periode 11 Oct 2011 hingga 11/11/2011 dari PT. Mondilla Bersaudara ke PT. Utama Karya yang dicap perusahaan PT. Mondilla dan ditandatangani oleh Maridin Jamil beserta lampirannya berupa surat penawaran;
371. 1 (satu) bundel SPK/SPP Periode 10 Nov 2011 hingga 01 Dec 2011

Hal. 57 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima PT. Mondilla Bersaudara dari PT. Utama Karya yang dicap perusahaan PT. Mondilla dan ditandatangani oleh Maridin Jamil beserta lampirannya;

372. 1 (satu) bundel *copy* Catatan Pembayaran PT. Utama Karya kepada PT. Mondilla Bersaudara yang dicap dan ditandatangani Maridin Jamil beserta lampirannya;

373. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Penagihan Biaya Retensi dari PT. Mondilla Bersaudara dengan nomor KW-26/04/2013 tanggal 8 April 2013 yang ditujukan kepada PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung beserta lampirannya;

374. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Surat dengan nomor 085/SRT/MDLNIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 dari PT. Mondilla Bersaudara yang ditujukan kepada PT. Utama Karya (Persero) perihal Permohonan tagihan retensi 5% untuk Proyek IPDN Bukit Tinggi beserta lampirannya berupa Kuitansi;

375. 1 (satu) bundel *copy* Rekening Koran Bank Mandiri Cabang KC Jkt Pulogadung atas nama Mondilla dengan nomor rekening 1250007932593 Periode Desember 2011 hingga Desember 2012;

376. 1 (satu) bundel *copy* Rekening Koran Bank BTN Cabang Jakarta Cawang atas nama PT. Mondilla Bersaudara dengan nomor rekening 0024101300003138 Periode Januari 2012 hingga Desember 2012;

377. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pengiriman Barang dari PT. Mondilla Bersaudara kepada PT. Utama Karya (Persero) berupa kusen dan pintu kayu dari Jakarta ke Bukit Tinggi periode 20 Desember 2011 hingga 09 April 2012 yang dicap dan ditandatangani oleh Maridin Jami;

378. 1 (satu) Rekapitulasi Penjualan PT. Mondilla Bersaudara Kpd PT. Utama Karya (Proyek IPDN Bukit Tinggi) yang sudah dibayar dan yang belum dibayar oleh Utama Karya yang dicap dan ditandatangani oleh Maridin Jamil;

379. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Legalitas atas nama PT. Modilla Bersaudara yang terdiri dari:

a. (satu) lembar *copy* NPWP atas nama PT. Mondilla Bersaudara Nomor

Hal. 58 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.917.637.9-432.000;

- b. 1 (satu) lembar *copy* TOP atas nama PT. Mondilla Bersaudara Nomor 102614605513 yang dikeluarkan tanggal 8 Oktober 2014;
 - c. 1 (satu) lembar *copy* SKDU Nomor 503/5/-Ekbanf/Kel.Jts tanggal 18 Maret 2015;
 - d. 1 (satu) lembar *copy* SIUP Nomor 510/161-BPPT/PM/II/2012 tanggal 2 Februari 2012;
 - e. 1 (satu) lembar *copy* SPPKP Nomor PEM-10164/WPJ.22/KP.1203/2008 tanggal 25 November 2008 atas nama PT. Mondilla Bersaudara
 - f. 1 (satu) lembar *copy* SKT Nomor PEM-10165NVPJ.22/KP.1203/2008 tanggal 25 November 2008 atas nama PT. Mondilla Bersaudara;
 - g. 1 (satu) lembar *copy* SK Menkeh Nomor c-15643 HT 01.01.TH 99 tanggal dikeluarkan 27 Agustus 1999;
 - h. 1 (satu) bundel *copy* Akta Pendirian PT. Mondilla Bersaudara oleh Notaris & PPAT Evawani Alissa Chairil Anwar, S.H., Nomor 2 tertanggal 11 Mei 1999;
 - i. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mondilla Bersaudara Nomor 15 tanggal 21 Maret 2009 oleh Notaris Halimah Sa'diyah, S.H;
 - j. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mondilla Bersaudara Nomor 8 tanggal 25 Juni 2013 oleh Notaris Bedjo Sarwono, S.H., M.Kn;
380. 1 (satu) lembar Surat Nomor 321/PR/X/11 tanggal 3 Oktober 2011 yang ditujukan kepada PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung, u.p. Bp. Toga Tambunan, ditandatangani oleh Ir. James Karosekali, PT. Proteksindo Utama;
381. 1 (satu) lembar Surat Nomor 166/PR/IV/12 tanggal 27 April 2012 yang ditujukan kepada PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung, u.p. Bp. Ir. Barry, S.T., ditandatangani oleh Ir. Erwina Suray Setiawaty, PT. Proteksindo Utama;
382. 1 (satu) bundel *copy* Surat Nomor 004/HK-IPDN-BS/Div.C/XII/11 tanggal 10 Desember 2011, hal Permohonan

Hal. 59 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nilai Kontrak Pekerjaan Pengecatan di Proyek Pembangunan Gedung IPDN Sum-Bar, ditujukan kepada PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung, u.p. Bpk. Ir. Tjahyo Purnomo, ditandatangani oleh Ir. Pedi Lestario, Kepala Proyek, beserta lampirannya;

383. 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/A.2030/SPP/231 tanggal 14 November 2011, Pekerjaan Pengecatan antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Proteksindo Utama untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat;
384. 1 (satu) bundel *copy* Addendum-I, Surat Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/A.2030/SPP-ADD 1/231, tanggal 12 Desember 2011, Pekerjaan Pengecatan antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Proteksindo Utama untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat;
385. 1 (satu) lembar *copy* Surat Nomor 093/PR/111/13 tanggal 5 Maret 2013, perihal Piutang PT. Proteksindo Utama, ditujukan kepada PT. Utama Karya, up. Bp. Aditya, ditandatangani oleh Ir. Erwina Suray Setiawaty, PT. Proteksindo Utama;
386. 1 (satu) bundel *copy* Surat Nomor HK.DG/TRIS.485/DIV.A/47 tanggal 20 Maret 2013, hal Kesepakatan Pembayaran, ditujukan kepada PT. Proteksindo, ditandatangani oleh Narwatri Kurniasih, S.E., beserta *copy* surat kesepakatan pembayaran;
387. 1 (satu) bundel Dokumen Penerimaan Proyek, Nama Proyek HK-IPDN, Bukit Tinggi, *Cost Code*: 156.CC.18.11.11, Nilai Kontrak: 987.951.622, tanggal cetak 16/09/2017, beserta lampirannya;
388. 1 (satu) lembar *print out* Dokumen berjudul "Data Tagihan PT. Utama Karya Proyek IPDN Sumbar", diparaf oleh Erwina Surya S (Direktur PT. Proteksindo Utama);
389. 1 (satu) bundel *copy* Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 0060004946863, atas nama Proteksindo Utama, periode 1 Des 2011 sampai dengan 23 Juni 2014, terkait penerimaan dari PT. Utama

Hal. 60 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Karya;

390. 1 (satu) bundel *copy* Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & Nomor Dok: BBK W 4840 kepada PT. Proteksindo Utama sejumlah Rp151.649.543,00 tanggal 07-Dec-11;
391. 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Pemborongan Nomor HK-DG/A.1327/SPP/100 tanggal 26 Juli 2012, Pekerjaan *Plafond Metal Linier* 84-C antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Jot Metal Works untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat;
392. 1 (satu) buah fotokopi Kuitansi PT. Jof Metal Works LTD Nomor 3016 tanggal (terbaca) 10-09-2012 yang ditandatangani oleh Lee Bok Bio dengan jumlah Rp60.164.200,00 untuk pembayaran uang muka beserta Faktur Pajak Nomor seri 030.000-12.00000922 tanggal 10 September 2012 dan Surat Perjanjian Pemborongan Pemborongan Nomor HK-DG/A.1327/SPP/100 tanggal 26 Juli 2012 untuk Pekerjaan *Plafond Metal Linier* 84-C antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Jof Metal Works untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat;
393. 1 (satu) buah fotokopi Kuitansi PT. Jof Metal Works LTD Nomor 3431 tanggal (terbaca) 28-11-2012 yang ditandatangani oleh Lee Bok Bio dengan jumlah Rp130.355.940,00 untuk pembayaran prestasi 100% beserta Faktur Pajak Nomor Seri 030.000-12.00001195 tanggal 29 November 2012 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 001/BAP/HK-IPDN/JOF/IX/2012 dan Berita Acara Serah Terima Pertama, yang ditandatangani oleh Raymond, S.T., selaku *Project Manager* PT. Utama Karya (Persero) dan Subarkah selaku *Project Manager* PT. Jof Metal Works serta Berita Acara Prestasi Nomor 002-14HH/BA-NC/XI/12;
394. 1 (satu) buah fotokopi Kuitansi PT. Jof Metal Works LTD Nomor 4863 tanggal (terbaca) 30-10-2013 yang ditandatangani oleh Lee Bok Bio dengan jumlah Rp10.027.385,00 untuk pembayaran retensi beserta Faktur Pajak Nomor Seri 030.902-13.44220887 tanggal 30 Oktober 2013 dan Berita Acara Serah Terima Kedua, yang ditandatangani oleh

Hal. 61 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raymond Debal, S.T., selaku *Project Manager* Proyek Kampus IPDN Sumatera Barat PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dan Subarkah selaku *Project Manager* PT. Jof Metal Works;

395. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Jof Metal Works Ltd. Dengan nomor rekening 119-00-9109216-1 periode 1/10/12 sampai dengan 31/10/12;
396. 1 (satu) lembar kertas berjudul 5.IPDN Sumbar yang mana merupakan rincian pembayaran pekerjaan dan sisa tagihan PT. Utama Karya (Persero) pada PT. Jof Metal Works yang berjumlah Rp152.316.000,00;
397. 1 (satu) bundel *print out email* dengan Judul:
Re: Fw: Bis: Kebutuhan sanitair; Dari: rozi rinjayadi (rinjayadi@gmail.com); Kepada: indokeramika@yahoo.co.id; tanggal Kamis, 3 November 2011 8: 39;
398. 4 (empat) lembar *copy* Dokumen Pesanan Pembelian Barang Nomor HK.DG/Ba.2074/ORD/188 tanggal 8 November 2011 kepada PT. Indokeramikatama Perkasa, Nomor HK.DG/Ba.2017/ORD/191 tanggal 14 November 2011, Nomor HK.DG/Ba.2112/ORD/201 tanggal 23 November 2011 dan Nomor HK.DG/Ba.0414/ORD/039 tanggal 5 Maret 2012;
399. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Kontrak Perjanjian Jual Beli Nomor HK-DG/Ba.2272/SPP/267 tanggal 8 November 2011 Pengadaan Sanitair merek Toto antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung Dengan PT. Indokeramikatama Perkasa untuk Proyek IPDN Baso-Bukit Tinggi;
400. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen yang terdiri dari Faktur Nomor 1079/IP/XI/2011, Faktur Nomor 1098/IP/XI/2011, Faktur Nomor 1152/IP/XI/2011; Faktur Nomor 1225/IP/XII/2011, Faktur Nomor 214/IP/11/2012, Faktur Nomor 215/IP/11/2012 dan Faktur Nomor 318/IP/11/2012 beserta lampiran Surat Jalan, Memo Dinas Angkutan dan Tanda Terima Barang;
401. 4 (empat) lembar *print out* Daftar Kontrak *Supplier* Dominan;
402. 1 (satu) bundel *copy* catatan tangan bertuliskan "Voucher Pembayaran

Hal. 62 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subkon P. Bukit Tinggi" disertai daftar *subkon/supplier* PT. Utama Karya;

403. 1 (satu) buah *odner* berwarna biru bertuliskan "SPP IPDN SUMBAR yang terdiri dari: Jagat Interindo, Yulian Berkah, Prima Karya, dst. OPS/DDO/P/001 Satuan Kerja Sumber Daya Tahun 2011 Kode SUMBAR-01";
404. 1 (satu) buah *odner* berwarna biru bertuliskan "SPP IPDN SUMBAR yang terdiri dari: Jatrindo, Jof Metal, Ost. OPS/DDO/P/001 Satuan Kerja Sumber Daya Tahun 2011 Kode SUMBAR-01";
405. 1 (satu) buah *odner* berwarna biru bertuliskan "Bukti Kerja Data Tender IPDN Buktitinggi OPS/DEDO/P/001 Satuan Kerja Teknik 2011-2012 KODE BKT-1";
406. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Pesanan Pembelian Barang Nomor HK.DG/hd.2050/ORD/186 tanggal 7 November 2011 beserta Faktur Pajak, Surat Pengantar dan draf Surat Direktur PT. Dinamika Pancar Kencana kepada PT. Utama Karya (Persero) tanggal 23 Desember 2011;
407. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) Masa Pajak Desember Tahun Pajak 2011, NPWP 01 554 714 4 211 000, Nama WP: PT. Dinamika Panca Kencana tanggal 17 Januari 2012;
408. 1 (satu) lembar *copy* Dokumen Rekening Giro Bank Mandiri Nomor 108-00-339988-9 atas nama PT. Dinamika Panca Kencana tanggal 01/04/12 hingga tanggal 30/04/12;
409. 1 (satu) lembar *copy* Dokumen Rekening Giro Bank Mandiri Nomor 108-00-339988-9 atas nama PT. Dinamika Panca Kencana tanggal 01/12/11 hingga tanggal 30/12/11 beserta Surat PT. Bank Mandiri kepada PT. Dinamika Pancakencana Nomor EX11772120614768 tanggal 28 Desember 2011 Perihal: *Advis Kredit*;
410. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Pesanan Pembelian Barang Nomor 132/IPDN/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 beserta Faktur Pajak, Surat Pengantar dan draf Surat Direktur PT. Dinamika Panca Kencana kepada PT. Utama Karya (Persero) tanggal 23 Desember 2011;

Hal. 63 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) Masa Pajak November Tahun Pajak 2011, NPWP 01 554 714 4 211 000, Nama WP: PT. Dinamika Panca Kencana tanggal 20 Desember 2011;
412. 1 (satu) lembar Dokumen berjudul "Daftar Surat Perjanjian dan Uang Masuk ke rekening atas nama Eka Saputra, S.Sos";
413. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Sewa Alat, Jenis Alat Exavator, Comatsu antara Ir. R. Pedi Lestario (Kapro Proyek) dan Eka Saputra (Pemilik Alat);
414. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Sewa Alat, Jenis Kendaraan Truck (Dump Truck), Mitshubishi antara Ir. R. Pedi Lestario Kapro Proyek) dan Eka Saputra (Pemilik Kendaraan);
415. 1 (satu) asli Buku Tabungan Rupiah Mandiri atas nama Eka Saputra, S.Sos., Nomor Rek: 111-00-0621480-9, KC Bukittinggi, tanggal cetak 19/10/2011;
416. 1 (satu) bundel *fc* Dokumen kontrak/SPK subkontraktor untuk pekerjaan: Upah pemasangan atap, subkon baja ringan dan subkon pekerjaan koral sikat;
417. 1 (satu) bundel *fc* Dokumen Pembelian Bahan Berupa Batu Bata, Terpal dan Plastik Car kepada UD Arnelin;
418. 1 (satu) bundel *fc* Dokumen Realisasi Penerimaan dari PT. Utama Karya/pembayaran bahan dan upah;
419. 1 (satu) bundel *fc* Dokumen Rekening Koran di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1110006176149 atas nama Sudiswar;
420. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Material Kayu CV. Jasa Keluarga untuk PT. Utama Karya tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan 19 Januari 2012 senilai total Rp96.369.000,00 yang harus dibayarkan ke rekening milik Sdri. Iyvone Anesia Bank Mandiri no rek 111.00.0402648.6;
421. 1 (satu) lembar asli Rangkuman Piutang Pelanggan CV. Trijaya Greshindo sampai dengan tanggal 21/03/2016 dengan *grand* total saldo Rp41.813.897,22 tercap CV. Tri Jaya Greshindo;
422. 1 (satu) bundel *copy* Faktur Pembayaran Nomor 058736 dengan jumlah Rp1.997124.000,00 dari CV. Trijaya Greshindo untuk IPDN

Hal. 64 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baso tertanggal 24-10-2011 beserta lampirannya;

423. 1 (satu) bundel *copy* Faktur Pembayaran Nomor 005286 dengan jumlah Rp27.627.600,00 dari CV. Trijaya Graeshindo untuk HK tertanggal 27-03-2012 beserta lampirannya;
424. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Rincian Pembelian PT. Utama Karya pada Toko Alam Indah Granit ditandatangani oleh Che Ichsan tanggal 21 Maret 2016;
425. 2 (dua) lembar *copy* Dokumen Rekening Tabungan Bank Mandiri Cbg Imam Bonjol Padang, Nomor 1110005868894 atas nama Che Ichsan, tanggal 29/02/12 sampai dengan 26/03/12 dan tanggal 28/03/12 sampai dengan 07/04/12;
426. 1 (satu) bundel Dokumen tindasan berwarna kuning yang terdiri dari Nota Alam Indah Granite Nomor 35195, 35196, 35301 dan 35374;
427. 1 (satu) lembar *print out* Dokumen Rekap Penjualan PT. Citra Bhakti Semestajaya ke PT. Utama Karya u/proyek IPDN, total Rp2.034.630.400,00;
428. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Surat PT. Citra Bhakti Semestajaya kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Nomor 001/CBS-BANK/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 Hal: Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, *Invoice*, Faktur Pajak, Kuitansi, Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang dan Surat Pengantar;
429. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Surat PT. Citra Bhakti Semestajaya kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Nomor 001/CBS-BANK/1/2012 tanggal Januari 2012 Hal: Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, *Invoice*, Faktur Pajak, Kuitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;
430. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Surat PT. Citra Bhakti Semestajaya

Hal. 65 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Nomor 003/CBS-BANK-H/1/2012 tanggal Januari 2012 Hal: Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, *Invoice*, Faktur Pajak, Kuitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;

431. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajaya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Nomor 004/CBS/DIS-HK/111/2012 tanggal Maret 2012 Hal: Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, *Invoice*, Faktur Pajak, Kuitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;

432. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Surat PT. Citra Bhakti Semestajaya kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Nomor 005/CBS/DIS-HK/111/2012 tanggal Maret 2012 Hal: Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, *Invoice*, Faktur Pajak, Kuitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;

433. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Surat PT. Citra Bhakti Semestajaya kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Nomor 006/CBS/DIS-HK/IV/2012 tanggal 17 April 2012 Hal: Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, *Invoice*, Faktur Pajak, Kuitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;

434. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Surat PT. Citra Bhakti Semestajaya kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Nomor 007/CBS/DIS-HK/IV/2012 tanggal 11 April 2012 Hal: Permohonan Diskonto dan

Hal. 66 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi UC / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, *Invoice*, Faktur Pajak, Kuitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;

435. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Surat PT. Citra Bhakti Semestajaya kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Nomor 008/CBS/DIS-HK/V/2012 tanggal Mei 2012 Hal: Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi UC / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, *Invoice*, Faktur Pajak, Kuitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;
436. 1 (satu) buah buku tulis Merck Paperline berwarna hijau dengan tulisan tangan "Hutama Karya Basa";
437. 1 (satu) lembar *print out* Dokumen Rekening BNI Taplus Nomor 0213964963 atas nama Welman Feri, S.H., periode 01/01/2012 sampai dengan 30/01/2012;
438. 1 (satu) bundel Dokumen asli Tanda Terima Kuitansi/Faktur Tagihan tanggal 23 September 2011 dan *copy* Dokumen Pesanan Pembelian Barang tanggal 14 September 2011, 16 September 2011 dan 19 September 2011;
439. 1 (satu) bundel Dokumen asli Tanda Terima Kuitansi/Faktur Tagihan tanggal 29 September 2011 dan *copy* Dokumen Pesanan Pembelian Barang tanggal 23 September 2011;
440. 1 (satu) bundel Dokumen asli yang terdiri dari :
- a. Tanda Terima Kuitansi/Faktur Tagihan tanggal 10 Oktober 2011;
 - b. Tanda Terima Kuitansi/Faktur Tagihan tanggal 17 Oktober 2011;
 - c. Tanda Terima Kuitansi/Faktur Tagihan tanggal 26 Oktober 2011;
 - d. Tanda Terima Kuitansi/Faktur Tagihan tanggal 1 November 2011;
 - e. Tanda Terima Kuitansi/Faktur Tagihan tanggal 14 November 2011;
 - f. Tanda Terima Kuitansi/Faktur Tagihan tanggal 29 November 2011;

Hal. 67 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Tanda Terima Kuitansi/Faktur Tagihan tanggal 27 Desember 2011;
 - h. Tanda Terima Kuitansi/Faktur Tagihan tanggal 12 Desember 2011;
 - i. Tanda Terima Kuitansi/Faktur Tagihan tanggal 17 Oktober 2011;
 - j. Tanda Terima Kuitansi/Faktur Tagihan tanggal 27 Januari 2012;
441. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen terdiri dari Pesanan Pembelian Barang tanggal 24 November 2010, Kartu Piutang, Tanda Terima Kuitansi/Faktur Tagihan, Kuitansi, Faktur/Kontan, drat Tanda Terima Tagihan, dan Bukti Pengiriman Barang;
442. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Faktur Pajak 010.000-12.00000009, 010.000-12.00000010; 010.000-12.00000015, drat Tanda Terima dan NPWP PT. Utama Karya;
443. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen yang terdiri dari:
- a. Surat CV. Karya Jaya Nomor 052/KJN/2012 tanggal 28 April 2012
Hal: Konfirmasi Tagihan;
 - b. Surat CV. Karya Jaya Nomor 061/KJN/2012 tanggal 19 Juni 2012
Hal: Tagihan;
 - c. Surat CV. Karya Jaya Nomor 082/KJ/IX/2012 tanggal 7 September 2012 Hal: Konfirmasi Tagihan;
 - d. Surat CV. Karya Jaya Nomor 087/KJ/IX/2012 tanggal 13 September 2012 Hal: Konfirmasi Tagihan;
444. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 111.000.559.3427 atas nama CV. Karya Jaya tanggal 02/06/12 sampai dengan 06/06/12, tanggal 06/08/12 sampai dengan 13/08/12, tanggal 16-Oct-2012 sampai dengan 23-Oct-2012 dan *copy* rekening giro Wadiah Institusi Bank Mandiri Syariah Nomor 7899989998 tanggal 04 Dec 12 sampai dengan 31 Dec 12;
445. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen yang terdiri dari fc KTP, fc NPWP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Salinan Akta

Hal. 68 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Komanditer "CV. Karya Jaya" Nomor 46 tanggal 15 Januari 2004;

446. 1 (satu) bundel *print out* Dokumen rekening Bank Mandiri Cabang Padang Nomor Rekening 1110006231019 nama Kredo Keramindo Seja Periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
447. 1 (satu) bundel Dokumen *copy* Faktur PT. Kredo Keramindo Sejahtera Faktur Nomor JL 1201/beserta *copy* Dokumen Faktur Pajak Nomor Seri 010.000-12.00000004 atas nama PT. Kredo Keramindo Sejahtera tanggal 6 Januari 2012;
448. 1 (satu) bundel Dokumen Dokumen asli Faktur PT. Kredo Keramindo Sejahtera Faktur Nomor JL02804 beserta fax Dokumen Pesanan Pembelian Barang PT. Utama Karya Nomor HK.DG/Ba.1889/ORD/170 tanggal 27 Oktober 2011;
449. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar asli Surat Nomor EX11771060614865 tanggal 13/01/2012 kepada Yth. Kredo Keramindo Sejahtera perihal: *Advis Kredit* ditandatangani Surya Musfarita;
 - 1 (satu) lembar fax Surat Pengalihan Hak PT. Kredo Keramindo Sejahtera tanggal 13 Januari 2012 ditandatangani oleh Wicky Leonardi;
 - 1 (satu) lembar fax Surat kepada Yth Kredo Keramindo Sejahtera Perihal: *Advice of Refusal*;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Nomor EX11771060614865 tanggal 20/12/2011 kepada Yth. Kredo Keramindo Sejahtera perihal *Advis Debit* ditandatangani Surya Musfarita;
 - 1 (satu) lembar asli Aplikasi Wesel Dokumenter Bank Mandiri tanggal 16 Desember 2011 tanggal 24 November 2011 sebesar Rp1.423.748.000,00;
 - 1 (satu) lembar Wesel lembar kedua sejumlah satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh rupiah tanggal 24 November 2011;

Hal. 69 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450. 1 (satu) bundel surat PT. Kredo Keramindo Sejahtera Nomor 1010/KKS/1.1/12.11 Hal: Advising SKBDN ke PT. Bank Mandiri (Persero) Kantor Pusat - Jakarta tanggal 15 Desember 2011, beserta lampirannya;
451. 1 (satu) bundel Surat Jalan dan Tanda Terima Proyek IPDN Baso;
452. 1 (satu) bundel Faktur Pajak Standar Nomor 010.000-11.00000061 atas nama PT. Kredo Keramindo Sejahtera NPWP 03.142.231.4-216.001 tanggal 12 Desember 2011 beserta lampirannya;
453. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1110002265383 Nama Kredo Bajatama Persa Periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
454. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen PT. Kredo Bajatama Persada Daftar Piutang PT. Utama Karya - Proyek IPDN Bukittinggi;
455. 1 (satu) bundel Dokumen *copy* Rekening Koran Giro Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor Rekening 2103.0103.00049-8 atas nama Egya Pratama CV. Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dan periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
456. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor 001.SPK/140/CBKT/2012 tanggal 6 Februari 2012 antara PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Bukittinggi dengan CV. Egya Pratama tentang Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan: PAL IPDN Kampus Sumbar dan Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi lokasi: Basa PT. PLN (Persero) Ranting Basa, Nilai Kontrak Rp45.663.000,00;
457. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen bertandatangan M. Irfan Buku Rekening Tabungan Bank Mandiri Cab. Bukittinggi Nomor 111.000.5873-7 atas nama Muhammad Irfan tanggal 15 September 2011 sampai dengan 31 Juli 2013;
458. 2 (dua) lembar Dokumen tulisan tangan Catatan Faktur Tagihan Tako Muaro Bangunan - Proyek IPDN Bukittinggi;
459. 1 (satu) bundel Dokumen *print out* Rekening Bank Mandiri Cabang Bukittinggi Nomor Rekening

Hal. 70 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1110005515222, Nama Chairunnas Periode 1 September 2011 sampai dengan 4 April 2013;

460. 1 (satu) lembar Tulisan Tangan Sdr. Muslim yang berisi catatan pekerjaan pemasangan tiang pancang proyek IPDN di Kabupaten Agam sebagaimana tercantum dalam Buku Agenda milik Sdr. Muslim dengan tulisan *The Infinity Design* SM 0433;

461. 1 (satu) bundel Dokumen *copy* Rekening Koran Giro Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi Nomor Rekening 0200.0103.00158-8 atas nama Tajak Engineering CV. Periode: 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;

462. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen yang terdiri dari:

a. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor 01/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/ XI/2011 tanggal 14 November 2011, Harga Kontrak Rp77.000.000,00;

b. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor 02/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/ XI/2011 tanggal 21 November 2011, Harga kontrak 106,370,000.00;

c. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor 03/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/ XI/2011 tanggal 21 November 2011, Harga Kontrak Rp91.630.000,00;

d. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor 04/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/ XI/2011 tanggal 14 November 2011, Harga Kontrak Rp77.000.000,00;

e. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor 05/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/ XI/2011 tanggal 21 November 2011, Harga Kontrak Rp106.370.000,00;

f. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor 06/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/ XI/2011 tanggal 21 November 2011, Harga Kontrak Rp91.630.000,00;

463. 1 (satu) lembar Dokumen *copy* Surat Direktur CV. Tajak Engineering kepada PT. Hutama Karya Proyek IPDN Bukittinggi Sumatera Barat Nomor 037/TEN-2012 tanggal 30 Mei 2012,

Hal. 71 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Rincian Pembayaran *Deep Well*;

464. 1 (satu) lembar Dokumen copy Surat Wakil Kepala Proyek Kampus IPDN Baso Bukittinggi kepada General Manager PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung Nomor 084/HK/IPDN/DIV.G.BT/UMNII/12 tanggal 16 Juli 2012, Perihal: Permohonan Pembayaran Hutang Tajak Engineering & Mina Karya;
465. 2 (dua) lembar Dokumen print out terdiri dari Berita Acara Pekerjaan tanggal 15 Maret 2012 sesuai kontrak Nomor 01/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 14 November 2011 dan Berita Acara Pekerjaan tanggal 15 Maret 2012 sesuai kontrak Nomor 02/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 21 November 2011;
466. 1 (satu) bundel Dokumen asli yang terdiri dari:
- Kuitansi Nomor 306/KWT-RU/HK-IPDN/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang diterima CV. Rado Utama dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp399.572.250,00 dan Tanda Terima tanggal 4 Januari 2012;
 - Kuitansi Nomor 311/KWT-RU/HK-IPDN/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang diterima CV. Rado Utama dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp19.800.000,00 dan Tanda Terima tanggal 4 Januari 2012;
 - Kuitansi Nomor 312/KWT-RU/HK-IPDN/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang diterima CV. Rado Utama dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp164.318.000,00 dan Tanda Terima tanggal 4 Januari 2012;
 - Kuitansi Nomor 318/KWT-RU/HK-IPDN/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang diterima CV. Rado Utama dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp915.524.597,00 dan Tanda Terima tanggal 18 Januari 2012;
 - Kuitansi Nomor 28/KWT-RU/HK-IPDN/11/2012 tanggal 10 Februari 2012 yang diterima CV. Rado Utama dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp10.980.420,00 dan Tanda Terima tanggal 25 Februari 2012;

Hal. 72 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kuitansi Nomor 41/KWT-RU/HK-IPDN/111/2012 tanggal 8 Maret 2012 yang diterima CV. Rado Utama dari PT. Hutama Karya (Persero) senilai Rp39.640.425,00 dan Tanda Terima tanggal 21 Maret 2012;
- g. Kuitansi Nomor 45/KWT-RU/HK-IPDN/111/2012 tanggal 9 Maret 2012 yang diterima CV. Rado Utama dari PT. Hutama Karya (Persero) senilai Rp27.488.175,00 dan Tanda Terima tanggal 31 Maret 2012;
- h. Kuitansi Nomor 47/KWT-RU/HK-IPDN/111/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang diterima CV. Rado Utama dari PT. Hutama Karya (Persero) senilai Rp18.884.899,00 dan Tanda Terima tanggal 31 Maret 2012;
- i. Kuitansi Nomor 48/KWT-RU/HK-IPDN/111/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang diterima CV. Rado Utama dari PT. Hutama Karya (Persero) senilai Rp4.675.000,00 dan Tanda Terima tanggal 31 Maret 2012;
- j. Kuitansi Nomor 55/KWT-RU/HK-IPDN/111/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang diterima CV. Rado Utama dari PT. Hutama Karya (Persero) senilai Rp29.816.111,00 dan Tanda Terima tanggal 25 April 2012;
- k. Kuitansi Nomor 61/KWT-RU/HK-IPDN/IV/2012 tanggal 16 April 2012 yang diterima CV. Rado Utama dari PT. Hutama Karya (Persero) senilai Rp25.300.000,00 dan Tanda Terima tanggal 25 April 2012;
- l. Kuitansi Nomor 62/KWT-RU/HK-IPDN/IV/2012 tanggal 16 April 2012 yang diterima CV. Rado Utama dari PT. Hutama Karya (Persero) senilai Rp2.337.500,00 dan Tanda Terima tanggal 25 April 2012;
- m. Kuitansi Nomor 66/KWT-RU/HK-IPDN/IV/2012 tanggal 16 April 2012 yang diterima CV. Rado Utama dari PT. Hutama Karya (Persero) senilai Rp10.120.000,00 dan Tanda Terima tanggal 3 Mei 2012;
- n. Kuitansi Nomor 68/KWT-RU/HK-IPDN/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang diterima CV. Rado Utama dari PT. Hutama Karya (Persero) senilai Rp10.672.200,00 dan Tanda Terima tanggal 23 Mei 2012;

Hal. 73 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Kuitansi Nomor 69/KWT-RU/HK-IPDN/IV/2012 tanggal 25 April 2012 yang diterima CV. Rado Utama dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp25.300.000,00 dan Tanda Terima tanggal 23 Mei 2012;
- p. Kuitansi Nomor 73/KWT-RU/HK-IPDNN/2012 tanggal 1 Mei 2012 yang diterima CV. Rado Utama dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp7.781.400,00 dan Tanda Terima tanggal 23 Mei 2012;
- q. Kuitansi Nomor 80/KWT-RU/HK-IPDNN/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang diterima CV. Rado Utama dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp1.402.500,00 dan Tanda Terima tanggal 30 Mei 2012;
- 467. 1 (satu) bundel Dokumen asli yang terdiri dari:
 - a. Surat Pengantar tanggal 17 November 2011 dan tanggal 20 November 2011;
 - b. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 48/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 90 KV A/XI/2011 tanggal 21 November 2011 dan Kuitansi telah terima dari PT. Utama Karya tanggal 21 November 2011;
 - c. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 99/HK/IPDN.BT/DIV.G/SKR-ALAT GENSET 90 KV A/XII/2011 tanggal 21 November 2011 tentang *Addendum* II Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 48/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 90 KV A/XI/2011 tentang Sewa Alat (Genset) antara PT. Utama Karya pada Proyek IPDN-Baso Bukittinggi dengan Edy Yusuf dan Kuitansi telah terima dari PT. Utama Karya tanggal 16 Desember 2011;
 - d. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 45/HK/IPDN.BT/DIV.G/SKR/XI/2011 tanggal 28 November 2011 tentang *Addendum* I Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 47/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 140 KV A/XI/2011 dan Nomor 48/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 90 KV A/XI/2011 tentang Sewa Alat (Genset) Antara PT. Utama Karya pada Proyek IPDN-Baso Bukittinggi dengan Edy Yusuf;
 - e. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 170/HK/IPDN-SPK-ALAT GENSET 90 KV A/1/2012 tanggal 20 Januari 2012 dan Kuitansi telah terima dari PT. Utama Karya tanggal 20 Januari 2012;
 - f. Surat Perjanjian Sewa Alat tanggal 20 Februari 2012 tentang

Hal. 74 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum I Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 170/HK/IPDN-SPK-ALAT GENSET 90 KV A/1/2012 tentang Sewa Alat (Genset) antara PT. Utama Karya (Persero) pada Proyek Kampus IPDN Bukittinggi dengan Rita Jusuf dan Kuitansi telah terima dari PT. Utama Karya tanggal 20 Februari 2011;

g. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 91/HK/IPDN.BT/DIV.G/SKR/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang *Addendum I* Nomor 47/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 140 KV A/XI/2011 dan Nomor 48/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 90 KV A/XI/2011 tentang Sewa Alat (Genset) antara PT. Utama Karya pada Proyek IPDN-Baso Bukittinggi dengan Edy Yusuf;

h. Bukti Kirim/Tanda Terima tanggal 3 Februari 2012;

468. 1 (satu) bundel Dokumen asli yang terdiri dari:

a. Surat Pengantar tanggal 21 November 2011;

b. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 47/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 140 KV A/XI/2011 tanggal 16 November 2011 dan Kuitansi telah terima dari PT. Utama Karya tanggal 16 November 2011;

c. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 91/HK/IPDN.BT/DIV.G/SKR-ALAT GENSET 140 KV A/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang *Addendum II* Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 47/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 140 KV A/XI/2011 tentang Sewa Alat (Genset) antara PT. Utama Karya pada Proyek IPDN-Baso Bukittinggi dengan Edy Yusuf dan dan Kuitansi telah terima dari PT. Utama Karya tanggal 16 Desember 2011;

d. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 172/HK/IPDN-SPK-ALAT GENSET 140 KV A/112012 tanggal 20 Januari 2012 dan Kuitansi telah terima dari PT. Utama Karya tanggal 20 Januari 2012;

e. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 178/HK/IPDN-SPPK-ALAT GENSET 140 KV A/111/2012 tanggal 20 Maret 2012 dan Kuitansi telah terima dari PT. Utama Karya tanggal 20 Maret 2012;

Hal. 75 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kuitansi telah terima dari PT. Utama Karya tanggal 21 April 2012 sejumlah Rp4.250.000,00;
 - g. Tanda Terima Kuitansi/Faktur Tagihan tanggal 26 April 2012;
469. 1 (satu) bundel Dokumen asli yang terdiri dari:
- a. Surat Pengantar tanggal 21 November 2011;
 - b. Surat Perjanjian Alat Nomor 96/HK.IPDN.BT/DIV.G/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 dan Kuitansi telah terima dari PT. Utama Karya tanggal 26 Desember 2011;
 - c. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 171/HK/IPDN-SPK-ALAT GENSET 100 KV A/1/2012 tanggal 26 Januari 2012 dan Kuitansi telah terima dari PT. Utama Karya tanggal 26 Januari 2012;
 - d. Surat Perjanjian Sewa Alat tanggal 27 Februari 2012 tentang *Addendum* I Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 171/HK/IPDN-SPK-ALAT GENSET 100 KV A/1/2012 tentang Sewa Alat (Genset) antara PT. Utama Karya pada Proyek Kampus IPDN Bukittinggi dengan Rita Yusuf dan dan Kuitansi telah terima dari PT. Utama Karya tanggal 27 Februari 2012;
 - e. Kuitansi telah terima dari Rita Jusuf tanggal 21 Maret 2012 sejumlah Rp5.000.000,00;
 - f. Berita Acara Serah Terima Pengembalian Uang Sewa Alat Gen set 100 KV A merek Mercedes Benz tanggal 15 Maret 2012;
470. 1 (satu) lembar *copy* Dokumen Rekening Bank BNI Cabang Bukittinggi Nomor 59225948 atas nama PT. PLN Cab. Bukittinggi tanggal 23 Dec 2011 sampai dengan 28 Dec 2011;
471. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen yang terdiri dari:
- a. Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat tanggal 21 Desember 2011;

Hal. 76 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Kepala Bagian Tata Usaha Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat kepada Kepala PLN Cabang Bukittinggi Nomor 015/610/IPDN-SB/2011 tanggal 25 Oktober Perihal: Permohonan Penyambungan Daya PLN;
 - c. Surat Kepala Bagian Tata Usaha Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat kepada Kepala PLN Cabang Bukittinggi Nomor 642/633/IPDN-SB/2011 tanggal 14 November 2011, Perihal: Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Tagihan Beban Bulanan Listrik;
 - d. Surat Manager PT. PLN (Persero) Ranting Baso kepada PT. PLN (Persero) Cab Bukittinggi Nomor 084/160/RBS0/2011 tanggal 16 November 2011, Perihal: Usulan Galon Pelanggan TM;
 - e. Surat Manager PT. PLN (Persero) Cabang Sukittinggi kepada Direktur IPDN Kampus Sumbar Nomor 548/161/CBKT/2011 tanggal 5 Desember 2011, Perihal: Persetujuan PAL;
 - f. Berita Acara Penyegehan KWH Meter Nomor 210/PB/10/2012;
472. 1 (satu) bundel Dokumen copy yang terdiri dari :
- a. Berita Acara Pemasangan/Penyambungan/Pembongkaran*) Sambungan Tenaga Listrik/Penggantian*) Nomor 04/APP/CBKT/02/2012 tanggal 27 Februari 2012;
 - b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai Nomor 023/SAST/613/CSKT/2012 tanggal 6 Maret 2012, Pekerjaan: PAL IPDN Kampus Sumbar dan Pusdiklat Kemendagri Reg. Bukittinggi;
 - c. Kuitansi Uang sebesar Rp45.981.000,00 yang diterima oleh CV. Egya Pratama dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Bukittinggi;
473. 1 (satu) bundel copy Dokumen Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam Nomor 05 sampai dengan 23/IMS/KPMPT-2012 tentang Izin Mendirikan

Hal. 77 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan, Kampus IPDN Sumatera Barat atas nama Drs. Saharuddin PPASBA, M.Si., tanggal 10 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Fatimah, S.Sos, M.Si., Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam;

474. 2 (dua) lembar *copy* Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012 pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam, SKPD Dinas Pekerjaan Umum (IMB), bulan Februari 2012;
475. 1 (satu) bundel *copy* Rekening Koran Bank Mandiri KCP Cabang Padang Muara dengan nomor rekening 1110100004940 atas nama PT. Statika Mitrasarana berikut lampirannya;
476. 1 (satu) bundel *copy* Rekapitulasi Transaksi antara PT. Statika Mitrasarana dan PT. Hutama Karya untuk proyek pembangunan IPDN Baso Sumbar Thn. 2011 dan 2012;
477. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Pembayaran dengan nomor 001/XI/2011 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) senilai Rp90.750.000,00 untuk pembayaran *readymix* K.300=100 M3 termasuk PPN 10% dicap dan ditandatangani pada tanggal 28 November 2011 berikut lampirannya;
478. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Pembayaran dengan nomor 002/XI/2011 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) senilai Rp9.075.000,00 untuk pembayaran *readymix* K.300=10 M3 dicap dan ditandatangani pada tanggal 28 November 2011 berikut lampirannya;
479. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Pembayaran dengan nomor 003/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) senilai Rp486.057.000,00 untuk pembayaran *readymix* K.300=535.6 M3 dicap dan ditandatangani pada tanggal 28 November 2011 berikut lampirannya;
480. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Pembayaran dengan nomor 004/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) senilai Rp499.125.000,00 untuk pembayaran *readymix*

Hal. 78 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.300=550 M3 dicap dan ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2011 berikut lampirannya;

481. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Pembayaran dengan nomor 006 P A/1/2012 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) senilai Rp25.725.000,00 dengan rincian:

- a. *Concrete Pump* < 40 M3 = 4XRp1.800.000,00;
- b. *Concrete Pump* > 40M3 x Rp35.000,00 dan
- c. Mobilisasi Pompa = 3x Rp750.000,00;

Dicap dan ditandatangani pada tanggal 5 Desember 2011 berikut lampirannya;

482. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Pembayaran dengan nomor 005/1/2012 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) senilai Rp453.750.000,00 untuk pembayaran *readymix* K.300=500 M3 dicap dan ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2012 berikut lampirannya;

483. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Pembayaran dengan nomor 006/1/2012 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) senilai Rp453.750.000,00 untuk pembayaran *readymix* K.300=500 M3 dicap dan ditandatangani pada tanggal 13 Januari 2012 berikut lampirannya;

484. 1 (satu) bundel *copy* Tanda Terima Kuitansi/Faktur Tagihan yang dikeluarkan oleh PT. Hutama Karya (Persero) terima dari PT. Statika M.S dengan uraian untuk pemb. C. Pump dan pemb. Beton ditandatangani oleh Manto dan tertanggal 25 Januari 2012 berikut lampirannya;

485. 1 (satu) bundel *copy* Tanda Terima Kuitansi/Faktur Tagihan yang dikeluarkan oleh PT. Hutama Karya (Persero) terima dari PT. Statika M.S dengan uraian untuk pemb *readymix* K 300, pemb Pemakaian C.P, Pemb. *Readymix* K.300, pemb. Pemakaian CP ditandatangani oleh Manda dan tertanggal 28 Februari 2012 dan bertuliskan *revisi* Faktur Nomor 010.000.12.00000013 tanggal 13/1-12 dan 010.000.12.00000018 tgl 20/1-12 berikut

Hal. 79 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampirannya;

486. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Pembayaran dengan nomor 010/111/2012 yang dikeluarkan oleh diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) senilai Rp136.125.000,00 untuk pembayaran *readymix* K.300=150 M3 dicap dan ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2012 berikut lampirannya;

487. 1 (satu) bundel *copy* Tanda Terima Kuitansi/Faktur Tagihan yang dikeluarkan oleh PT. Hutama Karya (Persero) terima dari PT. Statika dengan uraian untuk pemb. Beton K.300 senilai Rp45.375.000,00 ditandatangani oleh Manto dan ter tanggal 29 Maret 2012 berikut lampirannya;

488. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Pembayaran dengan nomor 002 CP A/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) senilai Rp9.375.000,00 dengan rincian:

- a. *Concrete Pump* Rp1.800.000,00;
- b. *Concrete Pump* > 40 M3 =195 M3 x Rp35.000,00 dan
- c. Mobilisasi Pompa Rp750.000,00;

Dicap dan ditandatangani pada tanggal 5 Desember 2011 berikut lampirannya;

489. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Pembayaran dengan nomor 004 CP A/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) senilai Rp9.900.000,00 dengan rincian:

- a. *Concrete Pump* Rp1.800.000,00;
- b. *Concrete Pump* > 40 M3 =210 M3 x Rp35.000,00 dan
- c. Mobilisasi Pompa Rp750.000,00;

Dicap dan ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2011 berikut lampirannya;

490. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Pembayaran dengan nomor 005 CP A/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) senilai Rp5.700.000,00 dengan rincian:

Hal. 80 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Concrete Pump* <40 M3 Rp1.800.000,00;
- b. *Concrete Pump* > 40 M3 =90 M3 x Rp35.000,00 dan;
- c. Mobilisasi Pompa Rp750.000,00;

Dicap dan ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2011 berikut lampirannya;

491. 1 (satu) bundel *copy* Kuitansi Pembayaran dengan nomor 006 CP A/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp9.075.000,00 dengan rincian:

- a. *Concrete Pump* < 40 M3 = 2 X Rp1.800.000,00;
- b. *Concrete Pump* > 40 M3 = 135 M3 x Rp35.000,00 dan
- c. Mobilisasi Pompa Rp750.000,00;

Dicap dan ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2011 berikut lampirannya;

492. 1 (satu) buah *odner* berwarna biru bertuliskan "BUTING => BUKTI2 UMUM (4)" berisikan Dokumen Pembayaran Subkon/*supplier* PT. Utama Karya;

493. 1 (satu) buah *odner* berwarna biru bertuliskan "BUTING (2)" berisikan Dokumen Pembayaran Subkon/*supplier* PT. Utama Karya;

494. 1 (satu) buah *odner* berwarna biru bertuliskan "BANK W DES-2011" berisikan Dokumen Pembayaran Subkon/*supplier* PT. Utama Karya;

495. 1 (satu) buah *odner* warna hitam bertuliskan "IPDN" yang berisikan Dokumen Risalah Rapat, Gambar Metode Kerjaan Perkerasan Jalan, *Review* Laporan Konsultan Manajemen Konstruksi, Kontrak Perjanjian Jual Beli dan Dokumen pendukung lainnya;

496. 1 (satu) buah *odner* berwarna biru bertuliskan "IPDN-BUKITTINGGI" yang berisikan Notulen *Meeting* dan lampirannya;

497. 1 (satu) buah *odner* berwarna biru bertuliskan "Surat Masuk";

498. 1 (satu) bundel Dokumen *copy* Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 158/Und/KK/KDNNII/2011 tanggal 22 Juli 2011 perihal: Undangan Rapat penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Pembangunan Gedung IPDN di Provinsi Sumatera Barat,

Hal. 81 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Berita Acara dan Risalah Penjelasan Pekerja atas nama;

499. 4 (empat) halaman Dokumen *print out* Risalah Rapat *Minutes of Meeting* Arkitek Team Empat;
500. 1 (satu) buah buku tulis Big Boss warna merah muda bermotif garis dengan tulisan "[*build on:your hope*]";
501. 1 (satu) bundel Dokumen Rekaman Data Biaya Penawaran Pengadaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011;
502. 1 (satu) lembar *copy* Rincian Penerimaan Proyek PT. Arkitek Team Empat tahun 2011 tertanggal 31/12/2011;
503. 1 (satu) lembar *copy* Surat dengan Kap Surat Arkitek Team Empat Nomor Surat 239/MZ/06.11 tanggal 27 Juni 2011, perihal Pergantian Personil Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Tahun Anggaran 2011;
504. 1 (satu) bundel *copy* Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Mahdiar Zamzami dengan Nomor rek: 1210004146480 periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2012;
505. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Penerimaan/Saldo Bank periode bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011, PT. Arkitek Team Empat;
506. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Penerimaan/Saldo Bank periode bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 PT. Arkitek Team Empat;
507. 1 (satu) bundel *copy* Rekening Giro Bank BNI Cabang Harmoni Nomor Rekening 0018305425 atas nama Arkitek Team Empat periode: 01/01/2011 sampai dengan 31/12/2011;
508. 1 (satu) bundel *copy* Rekening Koran Giro Bank Mandiri KC Jkt Kebon Sirih Nomor Rekening 121-00-0207130-0 atas nama PT. Arkitek Team Empat periode: 1/01/11 sampai dengan 31/12/11;

Hal. 82 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

509. 1 (satu) bundel *copy* Rekening Koran Giro Bank Mandiri Nomor Rekening 121-00-0207130-0 atas nama PT. Arkitek Team Empat periode 1/01/12 sampai dengan 31/12/12;
510. 1 (satu) bundel *copy* Laporan Transaksi Bank BRI cabang Veteran Nomor Rekening 03290100976306 atas nama Arkitek Team Empat periode 2 Desember 2011 sampai dengan 31 Mei 2012, 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Agustus 2013, 1 Oktober 2013 sampai dengan 28 Februari 2014;
511. 1 (satu) bundel *copy* Laporan Transaksi Bank BRI cabang Tanah Abang Nomor Rekening 001801000493301 atas nama Arkitek Team Empat PT. periode transaksi 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dan 1 Januari 2014 sampai dengan 28 Februari 2014;
512. 1 (satu) bundel *copy* Gaji Karyawan PT. Arkitek Team Empat bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011;
513. 1 (satu) bundel *copy* Gaji Karyawan PT. Arkitek Team Empat bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012;
514. 1 (satu) bundel Dokumen Pra-Kualifikasi Seleksi Umum Pengadaan Jasa Konsultasi Nomor 001/PRA/KK/KDN/111/2011 tanggal 16 Maret 2011, Paket Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat;
515. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1210002071300, atas nama PT. Arkitek Team Empat periode 1 November 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
516. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0018305425 atas nama PT. Arkitek Team Empat periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 beserta lampirannya;
517. 1 (satu) bundel *print out* rincian penerimaan proyek PT. Arkitek Team Empat tahun 2011 beserta lampirannya;
518. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Arkitek Team Empat pertanggal 31 Desember 2012 Tahun 2012;
519. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdapat Surat Nomor 239/MZ/06.11 perihal Pergantian Personil Pekerjaan

Hal. 83 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 tanggal 27 Juni 2011;

520. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Prestasi Mingguan Kemajuan Pekerjaan periode 11 tanggal 2 Desember sampai dengan 8 Desember 2011 Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam;
521. 1 (satu) bundel Reakpitulasi Prestasi Mingguan Kemajuan Pekerjaan periode minggu 1 sampai dengan minggu ke 7, Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam;
522. 2 (dua) lembar Surat Undangan Nomor 005/1157/PAKPANIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Ir. Dudy Jocom4;
523. 4 (empat) lembar Surat Sanggahan Nomor 522/NK.WI/TEKMAS/06/2011 tanggal 28 Juni 2011 yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan jasa Konsultasi di lingkungan Setjen Kemendagri dan ditandatangani oleh Raehman, S.T., M.M., General Manager Wilayah I PT. Nindya Karya;
524. 1 (satu) lembar Surat Nomor 418/NZ/11.11 tanggal 11 November 2011 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Arkitek Team Empat, Ir. Mahdiar Zamzami;
525. 1 (satu) lembar Surat Nomor 025/AT-4/XI/IPDN/2011 perihal evaluasi pelaksanaan tanggal 8 November 2011 yang ditandatangani oleh *team leader* PT. Arkitek Team Empat, Ir. Dadang Pratisto;
526. 1 (satu) lembar Surat Nomor 005/1628/PAKPA/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Arya Sumbayak, S.H, M.M;
527. 1 (satu) bundel *copy* Cek BRI Nomor Cek CEW 085999 sampai dengan 086000, Cek Bank Mandiri Nomor Cek FI 379639 sampai dengan 379642 beserta lampirannya;

Hal. 84 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

528. 1 (satu) bundel Dokumen gambar "KEYPLAN" kampus IPDN Baso Sumatera Barat, Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Artefak Arkindo;
529. 1 (satu) bundel Surat Nomor 418/IPDN/DIV.1.BK/X/2011 perihal Konversi Tiang Pancang 300x300 menjadi 250x250 tanggal 13 Oktober 2011, konsultan perencanaan PT. Bina Karya beserta lampirannya;
530. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Nomor 96/PU/KK/KDNNII/2011 tanggal 21 Juli 2011 pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011;
531. 1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Manajemen Konstruksi Nomor 026/SU/KK/KDN/IV/2011 tanggal 18 April 2011, Paket Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat;
532. 1 (satu) bundel Map berwarna biru bertuliskan "IPDN" yang berisi Dokumen diantaranya "rencana pengajuan penagihan";
533. 1 (satu) bundel Dokumen berisikan slip Bukti Pembayaran/ Penerimaan terkait IPDN Basa B. Tinggi Padang, PT. Arkitek Team Empat;
534. 1 (satu) bundel Dokumen Rapat Koordinasi Proyek IPDN Sumatera Barat Pekerjaan Perencanaan hari Selasa tanggal 15-11-2011 Jam 11.30 sampai dengan 18.45 tempat R. Rapat Manajemen Konstruksi;
535. 1 (satu) bundel *print out* yang bertuliskan IPDN Basa, Agam, Manajemen Konstruksi *Cost Plan* dst. Dimana di dalamnya berisikan juga *copy* Cek Bank Rakyat Indonesia Nomor Cek CEW 085987 sampai dengan CEW 085990 serta *copy* Cek BNI Nomor CR 691622 sampai dengan 691623;
536. 1 (satu) lembar *print out* Rekapitulasi Pengeluaran Rapat IPDN;

Hal. 85 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

537. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Pemilihan Manajemen Konstruksi Nomor 026/SU/KK/KDN/IV/2011 tanggal 18 April 2011 Paket Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011;
538. 1 (satu) buku berwarna coklat merek "Spiral Note" yang pada sampul depan terdapat tulisan tangan;
539. 1 (satu) bundel Map merah yang bertuliskan Masjid IPDN Basa di dalamnya terdapat gambar Denah Bangunan Masjid dan Catatan Masjid I PON 840 m2 = 672 OR, dst;
540. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jkt D.I Panjaitan PT. Bina Karya (Persero) nomor rekening 006-00-0040525-2 periode Januari sampai dengan Desember 2011;
541. 1 (satu) bundel asli Tabel Monitoring Proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Kode Proyek 1431 Divisi I PT. Bina Karya (Persero) Tahun 2010 beserta dokumen pendukung;
542. 1 (satu) bundel asli Tabel Monitoring Proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam. Kode Proyek 1486 Divisi I PT. Bina Karya (Persero) Tahun 2011 beserta dokumen pendukung;
543. 1 (satu) bundel *copy* Laporan Semester I Divisi I (Bangunan dan Lingkungan) PT. Bina Karya (Persero) Tahun 2011 beserta Laporan Bulanan Divisi I (Bangunan dan Lingkungan) PT. Bina Karya (Persero) periode bulan Agustus sampai dengan Desember 2011;
544. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16/01/2014 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan nama penerima Mohammad Noval Nomor Rekening Bank Mandiri 123.00.0460956.8;
545. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri

Hal. 86 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21/04/2015 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nama penerima Yudhi Muhammad Fauzi Nomor Rekening Bank Mandiri 900-00-2716865-8;

546. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19/09/2014 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan nama penerima Mohammad Noval Nomor Rekening Bank Mandiri 123.00.0460956.8;

547. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BNI tanggal 24/06/2014 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan nama penerima Mohammad Noval SL Nomor Rekening Bank BNI 0666888963;

548. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BNI tanggal 13/02/2014 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan nama penerima Mohammad Noval SL Nomor Rekening Bank BNI 0666888963;

549. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BCA tanggal 6/2/2014 dengan catatan 1062261972 dengan nama penerima dan no rekening tidak terbaca;

550. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 6 Feb 2014 dengan nama penerima Mohammad Noval Nomor Rekening Bank BCA 1062261972;

551. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 21 Desember 2011 senilai lima ratus ribu rupiah diterima dari Tn. Ir. Mohammad Noval Slabadjo untuk Pembayaran Biaya Legislasi Nomor 382/U2011 tanggal 21 Desember 2011 (surat persetujuan dan kuasa) dan fotokopi sesuai asli dengan tanda tangan Notaris Refizal, S.H., M.Hum;

552. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BNI tanggal 10/11/2014 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan nama penerima Yayasan CIP Tavisi Karya Kreasi dengan Nomor Rekening Bank BCA 505.501.8020 dengan pengirim Mohammad Noval Nomor Rekening BNI 0666888963;

Hal. 87 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

553. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Cab. Pecenongan Nomor Rekening 0324050704 atas nama Bpk. Mohammad Noval SL;
554. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Cab. Pecenongan Nomor Rekening 0666888963 atas nama Bpk. Mohammad noval SL;
555. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI tanpa identitas dan tanpa nomor rekening, periode awal tanggal 08/05/12 no buku C.6714011;
556. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI tanpa identitas dan tanpa nomor rekening, periode awal tanggal 22/11/13 no buku C9632330;
557. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Cabang Pintu Air Nomor Rekening 1062261972 atas nama Mohammad Noval SL Ir;
558. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mega Cabang Cikini Nomor Rekening 01-035-00-20-31614-8 Nomor Seri AA 015655 atas nama Ir. Mohammad Noval SL;
559. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 115-00-0409735-0 Kc Jakarta Mangga Besar 14/10/2003 1150321 atas nama Muhammad Noval S.L, Ir., QQ Nurul Jihan Khairunnissa Perum Jati Negara Baru Jalan Taman Sari V Nomor 22 RT.003 RW.016 Penggilingan;
560. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri Nomor rekening 123-00-0460956-8 Kcp Kramat Raya 12303 tgl Cetak 05/09/2013 atas nama Ir. Muhammad Noval S.L Jalan Kramat IV Nomor 14 RT.005 RW.009 Senen Kwitang Jakarta 10420;
561. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri tanpa identitas dan tanpa Nomor rekening, periode awal tanggal 12/09/06 saldo 500,000.00;
562. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri tanpa identitas dan tanpa nomor rekening, periode awal tanggal 24/08/11

Hal. 88 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo 25,619,851.36.00;

563. 1 (satu) Buku Tabungan BRI Britama Nomor rekening 0329-01-025513-50-1 Cabang 0329 Jakarta Veteran tgl 21 April 2015 atas nama Muhammad Noval Jalan Kramat IV Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat tanda pengenal KTP 3175060702720005 Nomor buku 17855802;
564. 1 (satu) Buku Tabungan BRI Britama tanpa Identitas dan tanpa Nomor rekening Cabang 0329 Kanca BRI JKT Nomor Buku 1934580;
565. 1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Rahadi Wiyanto Nomor Rekening 1270005673213 periode 01/01/2011 sampai dengan 31 Juli 2013;
566. 1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Husain Redwin Nurlette Nomor Rekening 1170004152047 periode 01/01/2011 sampai dengan 31/12/2014;
567. 1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Husain Redwin Nurlette Nomor Rekening 1650000067133 periode 01/01/2011 sampai dengan 31/07/2013;
568. 1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri atas nama CV. Prima Karya Sentosa Nomor Rekening 1640000405334 periode 17/11/2011 sampai dengan 31/01/2013;
569. 1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Muslim Nomor Rekening 1080002392612 periode 01/01/2011 sampai dengan 31/12/2013;
570. 1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Muslim QQ bin Syukur Nomor Rekening 1110005234501 periode 02/02/2011 sampai dengan 25/10/2011;
571. 1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Muslim Nomor Rekening 1110005802430 periode 01/01/2011 sampai dengan 31/12/2013;
572. 1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Joko Trimanto Nomor Rekening 1110004566085 periode 01/01/2011 sampai dengan 31/12/2013;

Hal. 89 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



573. 1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Sudiswar Nomor Rekening 1110006176149 periode 01/01/2011 sampai dengan 31/12/2013;
574. 1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Eka Saputra Nomor Rekening 1110006214809 periode 19/10/2011 sampai dengan 31/01/2013;
575. 1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Dasril Katik Mudo Nomor Rekening 1110006182337 periode 14/09/2011 sampai dengan 31/12/2015;
576. 1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama Eko Santoso, Nomor Rekening 32901018786503, periode 3 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2014;
577. 1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama Mohammad Noval, Nomor Rekening 32901008903501, periode 3 Januari 2011 sampai dengan 28 Desember 2014;
578. 1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama Sugeng Gunawan, Nomor Rekening 3290100890303505, periode 3 Januari 2011 sampai dengan 30 Desember 2014;
579. 1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama Kasdan, Nomor Rekening 32901027350501, periode 2 Januari 2011 sampai dengan 20 Desember 2014;
580. 1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama PT. Arkitek Team Empat, Nomor Rekening 1801000493301, periode 25 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2014;
581. 1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama PT. Arkitek Team Empat, Nomor Rekening 32901002976306, periode 14 Desember 2011 sampai dengan 25 Februari 2014;
582. 1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Mohammad Noval S.L Nomor Rekening 1230004609568 periode 01/01/2011 sampai dengan 31 Desember 2014;
583. 1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Sugeng Gunawan Nomor Rekening 1190006326464 periode

Hal. 90 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/08/2012 sampai dengan 31/12/2014;

584. 1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Arkitek Team Empat Nomor Rekening 121000207300 periode 01/01/2011 sampai dengan 31/12/2014;
585. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Pengadaan Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Regional di Kabupaten Agam, Sumatera Barat Tahun Anggaran 2010;
586. 3 (tiga) lembar Surat Nomor 011/273.A/PAKPAN/2010 tanggal 5 Mei 2010, perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Pelelangan yang ditandatangani oleh DR. Rizari, MBA., Msi., selaku PPK Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelola Asset Kemendagri, beserta lampirannya;
587. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Nomor 011/317/PKPAN/2010 tanggal 17 Mei 2010 antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT. Artefak Arkindo;
588. 1 (satu) bundel Dokumen Pembangunan Kampus IPDN Kabupaten Agam Bukit Tinggi - Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2010;
589. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan - Laporan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Tahap Perencanaan - Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2010;
590. 1 (satu) bundel *copy* Penelitian Tanah dengan alat bor mesin Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Regional Kabupaten Agam-Sumbar Tahun Anggaran 2010 bulan September 2010;
591. 1 (satu) bundel *copy* Laporan Bulanan Divisi I bulan Desember 2010 PT. Bina Karya (Persero);
592. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pekerjaan Struktur dan Infrastruktur Proyek Pembangunan Kampus IPDN Baso - Sumatera Barat Tahap 1 Tahun Anggaran 2010;

Hal. 91 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593. 1 (satu) lembar asli Rencana Anggaran Pelaksanaan Proyek (RAPP) Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Regional Bukit Tinggi Jangka Waktu Mei 2010 sampai dengan Desember 2010 tertanggal 16 Agustus 2010 beserta 1 (satu) lembar asli perincian RAPP-nya;
594. 2 (dua) lembar asli Rencana Anggaran Pelaksanaan Proyek (RAPP) Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Regional Bukit Tinggi Jangka Waktu Mei 2010 sampai dengan Desember 2010 tertanggal 25 Juni 2010 beserta 2 (dua) lembar asli perincian RAPP-nya;
595. 1 (satu) *odner* warna hitam berisikan Dokumen Bukti Kasbon Proyek Kampus IPDN Sumatera Barat;
596. 1 (satu) *odner* warna hitam berisikan Dokumen Buku Harian Gudang Penerimaan P4 B/P4 Logistik Proyek IPDN Baso;
597. 1 (satu) *odner* warna hitam berisikan Dokumen Buku Harian Gudang Penerimaan Nomor *odner* GB-8401 F;
598. 1 (satu) *odner* warna hitam berisikan Dokumen Persediaan Bahan, Alat, SPK Satuan Kerja Adm. Keuangan Kampus IPDN Bukittinggi;
599. 1 (satu) *odner* warna hitam berisikan Dokumen Bukti Pembayaran Subkon (Bank) Proyek Kampus IPDN Sumatera Barat;
600. 1 (satu) *odner* warna hitam berisikan Dokumen Catatan KAS IPDN Baso - (01) GB401 F;
601. 1 (satu) *odner* warna hitam berisikan Dokumen Bukti Kerja Daftar Rekanan Terseleksi/Terpilih Satuan Kerja Logistik Proyek IPDN Baso;
602. 1 (satu) *odner* warna hitam berisikan Dokumen Catatan Kas Proyek IPDN Baso - (02) GB401 F;
603. 1 (satu) *odner* warna hitam berisikan Dokumen Bukti Kasbon Pertanggungjawaban Peti Kas;
604. 1 (satu) *odner* warna hitam berisikan Dokumen Tanda Terima Barang Logistik;
605. 1 (satu) *odner* warna hitam berisikan Dokumen Catatan Peti Kas Proyek

Hal. 92 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IPDN (01);
606. 1 (satu) *odner* warna hitam berisikan Dokumen SPK Mandor/*Opname* Proyek IPDN;
607. 1 (satu) *odner* warna hitam berisikan Dokumen Bukti Kerja Kas Proyek IPDN Baso Padang Sumatera Barat-BKK 01-53;
608. 1 (satu) *odner* warna hitam berisikan Dokumen Bukti Kerja Kas Proyek Kampus IPDN Baso Padang Sumatera Barat - BKK 692 - 759;
609. 1 (satu) *odner* warna hitam berisikan Dokumen Catatan Peti Kas Proyek IPDN (02);
610. 1 (satu) *odner* warna hitam berisikan Dokumen Catatan Peti Kas Proyek IPDN (03);
611. 1 (satu) *odner* warna hitam berisikan Dokumen Catatan Peti Kas Proyek IPDN (04);
612. 1 (satu) *odner* warna hitam berisikan Dokumen Bukti Kerja KAS, Proyek Kampus IPDN - Baso Padang Sumatera Barat BKK 192 - BKK 238;
613. 1 (satu) *odner* warna hitam berisikan Dokumen Bukti Kerja KAS, Proyek Kampus IPDN - Baso Padang Sumatera Barat BKK 365 - BKK 435;
614. 1 (satu) buah *odner* berwarna biru bertuliskan "BUTING (3)" berisikan Dokumen Pembayaran Subkon/*supplier* PT. Utama Karya;
615. 1 (satu) buah *odner* berwarna biru bertuliskan "Bukti Nop-Des 2011" berisikan Dokumen Pembayaran Subkon/*supplier* PT. Utama Karya.
616. 1 (satu) buah *odner* berwarna biru bertuliskan "IPDN BUTING 3" berisikan Dokumen Pembayaran Subkon/*supplier* PT. Utama Karya;
617. 1 (satu) buah *odner* berwarna biru bertuliskan "SPJB IPDN BUKIT TINGGI" yang terdiri dari CV. Trijaya, PT. Kreda, PT. Aneka Cipta, PT. Baskara, PT. Dwi Prima, PT. Cijete, PT. Sinarindo, PT. Dwijaya Selaras, PT. Petro, PT. Indokeramikatana Tahun 2011-2012 dengan Kode: BT-1;
618. 1 (satu) buah *odner* berwarna biru bertuliskan "SPB & PO IPDN BUTING SD/LOG/P/001TEKNIK2011-2012 KODE BT-1";

Hal. 93 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

619. Satu bundel Dokumen terdiri dari:

- a. 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Direksi PT. Utama Karya (Persero) Nomor 2312/KPTS/78/2008 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat-Pejabat PT. Utama Karya (Persero) tanggal 13 Oktober 2008 yang di antaranya berisikan keterangan mengangkat Ir. Budi Rachmat Kurniawan dari Wakil *General Manager* Divisi Gedung pada Direktorat I menjadi Pj. *General Manager* Divisi Gedung pada Direktorat I PT. Utama Karya (Persero) di Jakarta;
- b. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Direksi PT. Utama Karya (Persero) Nomor 942/KPTS/29/2009 tentang Pengangkatan Status Jabatan Pejabat PT. Utama Karya (Persero) tanggal 12 Juni 2009 yang di antaranya berisikan keterangan mengangkat Ir. Budi Rachmat Kurniawan dari Pj. *General Manager* Divisi Gedung PT. Utama Karya (Persero) di Jakarta menjadi General Manager Divisi Gedung PT. Utama Karya (Persero) di Jakarta" beserta 2 (dua) lembar lampiran "*Job Description*" Jabatan *General Manager* Divisi;

620. 1 (satu) bundel *copy* Prosedur Prakualifikasi Tender PT. Utama Karya diterbitkan tanggal 29/03/2010;

621. 1 (satu) bundel *copy* Prosedur Rapat *Eksekutif Marketing* (REM) PT. Utama Karya diterbitkan tanggal 29/03/2010;

622. 1 (satu) bundel *copy* Prosedur Perintisan Proyek PT. Utama Karya diterbitkan tanggal 29/03/2010;

623. 1 (satu) bundel *copy* Prosedur Manajemen Kegiatan Pemasaran PT. Utama Karya diterbitkan tanggal 29/03/2010;

624. 1 (satu) bundel *copy* Prosedur Pelaksanaan PT. Utama Karya diterbitkan tanggal 29/03/2010;

625. 1 (satu) bundel *copy* Prosedur Karya Rampung PT. Utama Karya diterbitkan tanggal 29/03/2010;

626. 1 (satu) bundel *copy* Rekening Koran Bank BNI atas nama PT. Yulian Berkah Abadi Nomor Rek. 0096249910 periode 1 Oktober 2011

Hal. 94 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 31 Desember 2011;

627. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, Nomor Rek.0096249910 periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2006;
628. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, Nomor Rek.0096249910 periode Januari 2007 sampai dengan Agustus 2007 dan Oktober 2007 sampai dengan Desember 2007;
629. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, Nomor Rek.0096249910 periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2008;
630. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, Nomor Rek.0096249910 periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2009;
631. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, Nomor Rek.0096249910 periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2010;
632. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, Nomor Rek.0096249910 periode Januari 2011 dan Maret 2011 sampai dengan Desember 2011;
633. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, Nomor Rek.0096249910 periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2012;
634. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, Nomor Rek.0096249910 periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2013;
635. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, Nomor Rek.0096249910 periode Januari 2014 sampai dengan Oktober 2014;
636. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor (kosong) PT. Utama Karya Divisi Gedung U/Proyek Apartemen Sentra Timur, tertanggal 27 Oktober 2014 beserta 2 (dua) lembar tindasannya;

Hal. 95 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

637. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Emmy Marlina Simanjuntak, S.H., tentang Pendirian PT. Yulian Berkah Abadi tanggal 28 Oktober 2005;
638. 1 (satu) lembar rekening koran BNI dengan nomor *account* 0096249910 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi periode transaksi bulan September 2007;
639. 1 (satu) lembar rekening koran BNI dengan nomor *account* 0096249910 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi periode transaksi bulan 3 November 2014 sampai dengan 8 Desember 2014;
640. 1 (satu) lembar rekening koran BNI dengan nomor *account* 0096249910 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi periode transaksi bulan Februari 2011;
641. 1 (satu) bundel fotokopi Cek BNI beserta tanda terimanya dengan nomor Cek sebagai berikut:
- a. CX836259, tanggal 29 Februari 2012;
 - b. CX836252, tanggal 22 Februari 2012;
 - c. CX836254, tanggal 20 Februari 2012;
 - d. CX836253, tanggal 21 Februari 2012;
 - e. CX836256, tanggal 15 Februari 2012;
 - f. CX836255, tanggal 18 Februari 2012;
 - g. CX836251, tanggal 12 Februari 2012;
 - h. CX836247, tanggal 4 Februari 2012;
 - i. CX836245, tanggal 6 Februari 2012;
 - j. CX836246, tanggal 5 Februari 2012;
 - k. CX054852, tanggal 30 November 2011;
 - l. CX054870, tanggal 27 Januari 2012;
 - m. CX054505, tanggal 31 Oktober 2011;
642. 1 (satu) lembar *copy* kertas yang terdiri 2 atas dua buah *copy* Dokumen yakni: 1 (satu) lembar Kuitansi dari PT. Yulian Berkah Abadi senilai Rp77.046.000,00 tertanggal 25 Januari 2012 dan 1 (satu) lembar *copy* Cek BNI dengan nomor CX 054870 tertanggal 27 Januari 2012 senilai Rp42.881.600,00;
643. 3 (tiga) lembar *copy* Cek Bank BNI terdiri atas Cek BNI nomor CX

Hal. 96 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

836247 tertanggal 4 Februari 2012 senilai Rp300.013.754,00 Cek BNI nomor CX 836245 tertanggal 6 Februari 2012 senilai Rp.380.000.000,00 dan Cek BNI nomor CX 836246 tertanggal 5 Februari 2012 senilai Rp335.000.000,00;

644. 1 (satu) lembar *copy* Cek Bank Mandiri dengan nomor FG 952078 senilai enam ratus dua puluh lima juta rupiah (Rp625.000.000,00) tertanggal 18 Januari 2012;
645. 1 (satu) lembar *copy* Cek Bank Mandiri dengan nomor FG 952079 senilai lima ratus juta rupiah (Rp500.000.000,00) tertanggal 20 Januari 2012;
646. 2 (dua) lembar *copy* Cek Bank Mandiri dengan nomor FG 952080 dan FG 952081 senilai masing-masing tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah (Rp742.810.500,00) tertanggal 18 Januari 2012;
647. 1 (satu) lembar asli Cek BNI Nomor CX054505 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp28.000.000,00 tanggal pencarian 31 Oktober 2011;
648. 1 (satu) lembar asli Cek BNI Nomor CX836256 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp360.000.000,00 tanggal pencarian 24 Februari 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa *copy* identitas pencari;
649. 1 (satu) lembar asli Cek BNI Nomor CX836255 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp340.000.000,00 tanggal pencarian 24 Februari 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencari;
650. 1 (satu) lembar asli Cek BNI Nomor CX836245 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp380.000.000,00 tanggal pencarian 6 Februari 2012;
651. 1 (satu) lembar asli Cek BNI Nomor CX836246 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp335.000.000,00 tanggal pencarian 6 Februari 2012;
652. 1 (satu) lembar asli Cek BNI Nomor CX054501 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp300.000.000,00 tanggal pencarian 28 Oktober 2011, beserta 1 lembar lampiran berupa *copy* identitas pencari;

Hal. 97 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



653. 1 (satu) lembar asli Cek BNI Nomor CX054504 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 472.000.000,00 tanggal pencarian 28 Oktober 2011, beserta 1 lembar lampiran berupa *copy* identitas pencair;
654. 1 (satu) lembar asli Cek BNI Nomor CV116480 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp600.000.000,00 tanggal pencarian 27 Oktober 2011, beserta 1 lembar lampiran berupa *copy* identitas pencair;
655. 1 (satu) lembar asli Cek BNI Nomor CX836247 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp300.013.754,00 tanggal pencarian 7 Februari 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa *copy* identitas pencair;
656. 1 (satu) lembar asli Cek BNI Nomor CX836252 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp300.000.000,00 tanggal pencarian 23 Februari 2012;
657. 1 (satu) lembar asli Cek BNI Nomor CX836253 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp475.000.000,00 tanggal pencarian 23 Februari 2012;
658. 1 (satu) lembar asli Cek BNI Nomor CX836254 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp300.000.000,00 tanggal pencarian 23 Februari 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair;
659. 1 (satu) lembar asli Cek BNI Nomor CA915402 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp191.805.000,00 tanggal pencarian 6 Maret 2012;
660. 1 (satu) lembar asli Cek BNI Nomor CX054870 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp42.881.600,00 tanggal pencarian 6 Maret 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair;
661. 1 (satu) lembar asli Cek BNI Nomor CA915421 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp640.610.000,00 tanggal pencarian 9 Mei 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair;
662. 1 (satu) lembar asli Cek BNI Nomor CA915420 Z atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp197.198.400,00 tanggal pencarian 10 Mei 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair;

Hal. 98 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

663. 1 (satu) lembar asli Cek BNI Nomor CA915424 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp25.000.000,00 tanggal pencarian 29 Mei 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair;
664. 1 (satu) lembar asli Cek BNI Nomor CX054852 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp330.000.000,00 tanggal pencarian 30 November 2011, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair;
665. 1 (satu) buah Buku berukuran folio berwarna biru bertuliskan Register Bank Bukopin Operasional A/C 101.9467.011 Tahun 2012;
666. 1 (satu) buah Buku berukuran folio berwarna biru bertuliskan Bukopin;
667. 1 (satu) buah Buku berukuran folio berwarna hijau tua bertuliskan Bank Mandiri Iskandarsyah A/C 126.000.44.79.324;
668. 1 (satu) file *odner* berwarna biru yang berisi Dokumen sebagai berikut:
- a. (satu) bundel Rekening Koran Bank Bukopin PT. Utama Karya, Div Gedung dengan nomor rekening 1019467011 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2011;
 - b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Bukopin PT. Utama Karya, Div Gedung dengan nomor rekening 1019469014 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2011;
 - c. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Bukopin PT. Utama Karya, Div Gedung dengan nomor rekening 1019370018 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2011;
 - d. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Bukopin PT. Utama Karya, Div Gedung dengan nomor rekening 1019468018 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2011;
 - e. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jkt Iskandarsyah PT. Utama Karya, Jalan Iskandarsyah 1/6 Kebayoran Baru Melawai Jakarta 12160 dengan nomor rekening 12600044 79324 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2011;
 - f. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jkt Jatinegara Timur PT. Utama Karya, Jalan Iskandarsyah 1/6 Kebayoran Baru Melawai Jakarta 12160 dengan nomor rekening 0060092009087 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2011;

Hal. 99 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI KCP Jkt Cikajang PT. Utama Karya, Wilayah II Jalan Iskandarsyah 1/6 Melawai Kebayoran Baru dengan nomor rekening 065101000034303 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2011;
- h. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BTN Cabang Bekasi PT. Utama Karya Jalan Iskandarsyah 1 Nomor 6 Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 dengan nomor rekening 0001601300018227 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2011;
- i. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Cabang 63 Senayan PT. Utama Karya Jalan Iskandarsyah 1 Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 dengan nomor rekening 0004453322 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2011;
- j. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Cabang 63 Senayan PT. Utama Karya Jalan Iskandarsyah 1 Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 dengan nomor rekening 0004453286 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2011;
- k. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank DBS Cabang Thamrin Jakarta PT Utama Karya Divisi Gedung Jalan Iskandarsyah 1 Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 dengan nomor rekening 3020000356 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2011;
- 669. 1 (satu) file *odner* berwarna biru yang berisi Dokumen sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT. Utama Karya Divisi Gedung Jalan Iskandarsyah I Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan nomor rekening 1019467011 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2012;
 - b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT. Utama Karya Divisi Gedung Jalan Iskandarsyah I Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan nomor rekening 1019469014 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2012;
 - c. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT. Utama Karya Divisi Gedung Jalan Iskandarsyah I Nomor 6

Hal. 100 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan nomor rekening 1019468018 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2012;
- d. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT. Utama Karya Divisi Gedung Jalan Iskandarsyah I Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan nomor rekening 1019370018 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2012;
- e. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BTN Cabang Bekasi milik PT. Utama Karya Jalan Iskandarsyah I Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160, dengan nomor rekening 0001601300018227 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2012;
- f. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BRI milik PT. Utama Karya Jalan Iskandarsyah I Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan nomor rekening 032901002977302 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2012;
- g. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BRI milik PT. Utama Karya Jalan Iskandarsyah I Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan nomor rekening 032901003002304 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2012;
- h. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BRI milik PT. Utama Karya Wilayah II KCP Cikajang Jalan Iskandarsyah I Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan nomor rekening 065101000034303 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2012;
- i. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BNI milik PT. Utama Karya Cabang: 63 Senayan Jalan Iskandarsyah I Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan nomor rekening 0271533722 periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2012;
- j. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Mandiri milik PT. Utama Karya KCP Jkt Iskandarsyah Jalan Iskandarsyah I Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan nomor rekening 126.00.0447932.4 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2012;

Hal. 101 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Mandiri milik PT. Utama Karya KCP Jkt Jatinegara Timur Jalan Iskandarsyah I Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan nomor rekening 0060092009087 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2012;
670. 1 (satu) file *odner* berwarna biru yang berisi Dokumen sebagai berikut:
- a. (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT. Utama Karya Divisi Jalan Iskandarsyah I Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan nomor rekening 1019467011 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2013;
 - b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT. Utama Karya Divisi Gedung Jalan Iskandarsyah I Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan nomor rekening 1019469014 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2013;
 - c. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT. Utama Karya Divisi Gedung Jalan Iskandarsyah I Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan nomor rekening 1019468018 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2013;
 - d. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT. Utama Karya Divisi Gedung Jalan Iskandarsyah I Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan nomor rekening 1019370018 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2013;
 - e. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BNI milik PT. Utama Karya Divisi Gedung Jalan Iskandarsyah I Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan nomor rekening 0271533722 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2013;
 - f. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Mandiri milik PT. Utama Karya Divisi Gedung Jalan Iskandarsyah I Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan nomor rekening 1260004479324 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2013;

Hal. 102 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BRI milik PT. Utama Karya Divisi Gedung Jalan Iskandarsyah I Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan nomor rekening 032901002977302 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2013;
- h. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BRI milik PT. Utama Karya Divisi Gedung Jalan Iskandarsyah I Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan nomor rekening 032901003002304 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2013;
- i. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI milik PT. Utama Karya Divisi Gedung Jalan Iskandarsyah I Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan nomor rekening 2715337224 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2013;
- j. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BRI milik PT. Utama Karya Divisi Gedung Jalan Iskandarsyah I Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan nomor rekening 065101000034303 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2013;
- k. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Mandiri milik PT. Utama Karya Divisi Gedung Jalan Iskandarsyah I Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan nomor rekening 0060092009087 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2013;
- l. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BTN milik PT. Utama Karya Divisi Gedung Jalan Iskandarsyah I Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan nomor rekening 0001601300018227 periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2013;
671. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Nomor 011/837/PAKPA/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010. Ditandatangani oleh Ir. Dudy Jocom (Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset, Kementerian Dalam Negeri) dan Rachman, S.T., M.M., (*General Manager* Wilayah I PT. Nindya Karya

Hal. 103 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



(Persero));

672. 2 (dua) lembar *copy* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-739 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-2A Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran, serta Bendahara Pengeluaran di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010, ditandatangani oleh Diah Anggraeni atas nama Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal tanggal 27 September 2010, beserta 1 (satu) lembar *copy* lampirannya;

673. 2 (dua) lembar *copy* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-940 Tahun 2010 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-16 Tahun 2010 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Tahun Anggaran 2010 di lingkungan Departemen Dalam Negeri ditandatangani oleh Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri tanggal 15 November 2010 beserta 4 (empat) lembar *copy* lampirannya;

Barang Bukti Elektronik yaitu:

1. 1 (satu) keping CD-RW kapasitas 700 MB, merek Sony dengan tulisan tangan "Data SPM BMN Komputer Alm Prihartawan" yang ditandatangani Arya tanggal 1/3-2016, S/N AK05D131W0419 80B1;
2. 1 (satu) keping DVD+R 8X *Double Layer* kapasitas 240Min/8.5 GB, merek Ritek, S/N: TEg405144614E09, dengan tulisan "Data IPDN Ibu Yurike" yang ditandatangani Arya tanggal 1/3-2016;
3. 1 (satu) *Harddisk*, merek Hitachi, kapasitas 250 GB, SIN: JP0272J20KV8TM yang diambil dari komputer Tri Adji Bawono di Ruangan Bidang Pengelolaan BMN Lt. 4 Kementerian Dalam Negeri;
4. 1 (satu) buah *Flashdisk* berwarna hijau muda, merek TDK, S/N: 070753ED991 F3887 (dilihat dengan USB *Deview*);
5. (satu) keping DVD dengan merek Verbatim, SIN:

Hal. 104 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAPA18RC281219103, kapasitas 4.7 GB, yang di dapat dari ruang keuangan dan penguasa barang Sugeng;

6. 1 (satu) *Harddisk* dengan merek Seagate, S/N: 9RXN2YKY, tipe ST3160215A, kapasitas 160 GB yang didapat dari ruang keuangan;
7. 1 (satu) keping DVD dengan merek Ritek, S/N: TEg405144036D10, kapasitas: 8.5 GB, yang didapat dari ruang logistik dan penguasa barang Budi Ardianto;
8. 1 (satu) keping DVD dengan merek Ritek, S/N: TEg405144039A10, kapasitas: 8.5 GB, yang didapat dari ruang logistik dan penguasa barang Kurniati Evilia;
9. 1 (satu) keping CD-R dengan merek Verbatim, S/N: B3131RE04131629LH, kapasitas 700 MB, yang didapat dari Ruang Teknik dan penguasa barang Isfiyanto;
10. 1 (satu) keping DVD dengan merek Verbatim, SIN: MAPA18RC281218005, kapasitas: 8.5 GB, yang didapat dari ruang pemasaran;
11. 1 (satu) keping DVD dengan merek Ritek, S/N: TEg405140246A11, kapasitas: 8.5 GB, yang didapat dari ruang pemasaran dan penguasa barang Anton;
12. 1 (satu) buah *Hardisk* 3,5" merek Seagate Barracuda, tipe ST3250318AS, S/N: 6VMDZTL6, Kapasitas 250GB, yang digunakan oleh Bambang Sudibyo;
13. 1 (satu) buah *Hardisk* 3,5" merek Seagate Barracuda, tipe ST3250318AS, S/N: 6VMAM19Z, Kapasitas 250GB, yang digunakan oleh Yusnita Verawati;
14. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan S/N: A3131 RE04112693LH, kapasitas 700MB yang berisi data Keuangan Catatan Kas dan Bank tahun 2010 sampai dengan 2012 PT. Bina Karya, yang diperoleh dari komputer kasir yang digunakan dan ditandatangani oleh Ibu Rika Rola;
15. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan S/N: A3131RE04131508LH, kapasitas 700MB yang berisi data Keuangan Buku Besar (GL) tahun

Hal. 105 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sampai dengan 2014 PT. Bina Karya, yang diperoleh dari komputer Akuntansi yang digunakan dan ditandatangani oleh Firli Ransyah;

16. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan S/N: A3131 RE04131500LH, kapasitas 700 MB yang berisi File-File dari hasil pencarian dengan kata kunci "IPDN" yang diperoleh dari komputer yang digunakan oleh Iwan;
17. 1 (satu) keping CD dengan merek Verbatim, S/N: A3131 RE04063229LH, kapasitas 700 MB, penguasa barang Ratna Juwita bagian administrasi;
18. 1 (satu) keping CD dengan merek Verbatim, S/N: N129RD26D8100092C1, kapasitas 700 MB, bertuliskan CCO Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam 22052015 - Yossi;
19. 1 (satu) keping CD dengan merek Verbatim, S/N: N129RD26D8100093E2, kapasitas 700 MB, bertuliskan ASBUILT + CCO IPDN Baso;
20. 1 (satu) keping DVD dengan merek Verbatim, S/N: MAPA07RC26191913, kapasitas 4.7 GB, yang didapat dari ruang administrasi *akunting*;
21. 1 (satu) keping DVD dengan merek Verbatim, S/N: MAPA18RC281221536, kapasitas: 4.7 GB, yang didapat dari ruang administrasi *akunting*;
22. 1 (satu) keping DVD dengan merek Ritek, S/N: 1Eg405143633S10, kapasitas: 8.5 GB, yang didapat dari ruang studio *designer*;
23. 1 (satu) buah Ipad warna *silver* hitam dengan *casing* BELK warna hitam kapasitas 64 GB model A1430 IMEI 013314001854108 Serial DMPJPOOYDVGJ;
24. 1 (satu) buah *Handphone* merek Nokia MODEL 225 warna kuning tipe RM-1011 IMEI 1: 353672060388286 IMEI 2: 353672060388294 tanpa *Sim Card* dan tanpa *Memory Card*;
25. 1 (satu) buah *Harddisk Eksternal* merek Smart Drive, model Nomor HD3-SU2, S/N: 0836851, yang di dalamnya terdapat *Harddisk* 2.5 inchi merek Fujitsu, model: MHZ2160BH G2, S/N: K60HT872ANWG, kapasitas: 160 GB, beserta dengan kabel data dan *cover harddisk* warna

Hal. 106 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam bertuliskan DPR;

26. 1 (satu) buah *Handphone* merek Blackberry Bold 9790 warna hitam, model: REC71 UW, IMEI: 359201040965247, PIN: 28CB3A52, tanpa *Sim Card* dan tanpa *Memory Card*;

27. 1 (satu) keping DVD-R merek Verbatim, S/N MAPA07RC270440392 berisi data dari laptop milik Dadang Prastito yang ditandatangani Enny Dewi Anggraini tanggal 02-03-2016;

28. 1 (satu) buah CD yang bertuliskan "File Kontrak" yang berisikan:

- 1 (satu) buah *softcopy* Dokumen dalam bentuk file *Microsoft Word* nama "Gatrindo Baja Gerbang";
- 1 (satu) buah *softcopy* Dokumen dalam bentuk file *Microsoft Word* nama "Gatrindo GRC";
- 1 (satu) buah *softcopy* Dokumen dalam bentuk file *Microsoft Word* nama "Ipdn Sumbar";
- 1 (satu) buah *softcopy* Dokumen dalam bentuk file *Microsoft Word* nama "Jagat Alumunium";
- 1 (satu) buah *softcopy* Dokumen dalam bentuk file *Microsoft Word* nama "Job Metal Plafond";
- 1 (satu) buah *softcopy* Dokumen dalam bentuk file *Microsoft Word* nama "Mandiri Plafond";
- 1 (satu) buah *softcopy* Dokumen dalam bentuk file *Microsoft Word* nama "Pengadaan Baja";
- 1 (satu) buah *softcopy* Dokumen dalam bentuk file *Microsoft Word* nama "Prima Karya area asrama";
- 1 (satu) buah *softcopy* Dokumen dalam bentuk file *Microsoft Word* nama "Prima Karya Infra";
- 1 (satu) buah *softcopy* Dokumen dalam bentuk file *Microsoft Word* nama "Prima Karya InfrastrukturAdm";
- 1 (satu) buah *softcopy* Dokumen dalam bentuk file *Microsoft Word* nama "Proteksindo Cat";
- 1 (satu) buah *softcopy* Dokumen dalam bentuk file *Microsoft Word* nama "RESTU InfrastrukturAdm";

Hal. 107 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *softcopy* Dokumen dalam bentuk file *Microsoft Word* nama "Sakha Baja";
 - 1 (satu) buah *softcopy* Dokumen dalam bentuk file *Microsoft Word* nama "Sinarindo Baja";
 - 1 (satu) buah *softcopy* Dokumen dalam bentuk file *Microsoft Word* nama "Sinarindo JB Baja";
 - 1 (satu) buah *softcopy* Dokumen dalam bentuk file *Microsoft Word* nama "sumarto-Patung";
 - 1 (satu) buah *softcopy* Dokumen dalam bentuk file *Microsoft Word* nama "Surya Baja Angkutan";
 - 1 (satu) buah *softcopy* Dokumen dalam bentuk file *Microsoft Word* nama "YULIAN AREA PERPUS";
29. 1 (satu) buah DVD-R merek Verbatim, SN: MAPA24TC27011199, bertuliskan "*History Cash Flow Bukit Tinggi*" yang di dalamnya terdapat file "*History Cash Flow Bukit Tinggi 2011 sampai dengan 2014_Pie Chart.xlsx*";
30. 1 (satu) buah *Bluray Disc* merek Maxell S/N: BRF663RL 8 RB L3 yang di dalamnya terdapat file dengan nama "*Outlook Data File - ate.pst*", dengan kapasitas: 8.745.737 KB. (nilai MD5 Hash dari file tersebut adalah b310826bc959e8a341e320d012b3f2fc & SHA 1 HASH: 896f48eca3ccf9f45214cac85cd80c61972727a6e4;
31. 1 (satu) keping CD-R plus dengan tulisan IPDN Sumbar I RAB;
32. 1 (satu) keping CD-R plus dengan tulisan IPDN Sumbar II GAMBAR;
33. 1 (satu) buah DVD-R merek Verbatim, SN: MAPA24TC27011101, dengan tulisan "Petty Kas IPDN Bukit Tinggi," yang di dalamnya berisi file *excel* dengan nama "Rekap 2011 dan 2012";
34. 1 (satu) buah *Hardisk* merek Seagate Model ST9500420AS Nomor Seri 5VJ99LLB Kapasitas 500 GB diambil dari Laptop Andri Budi Setyawan;
35. 1 (satu) buah *Hardisk* merek Seagate Model ST1000DM003 Nomor Seri ZID4LJNL Kapasitas 1000 GB diambil dari PC Server Akuntansi;
36. 1 (satu) buah *Hardisk* merek Seagate Model ST3160021A Nomor Seri 4JS26FSM Kapasitas 160 GB diambil dari Komputer Kasir;

Hal. 108 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) buah *Hardisk* merek Seagate Model ST340014A Nomor Seri 5MQ0OEBAJ Kapasitas 40 GB diambil dari PC ruangan logistic lantai 2;
 38. 1 (satu) buah *Hardisk* merek Hitachi model HDT721016SLA380 Nomor Seri MB2SRB6B Kapasitas 160 GB diambil dari ruangan Administrasi dan Akutansi;
 39. 1 (satu) buah *Hardisk* WD 640GB, S/N: WX41A21H3299 yang digunakan oleh R. Soetanto;
 40. 1 (satu) buah *Hardisk* WD 1.0 TB, S/N: WX41 E44LND88 yang digunakan oleh Ngatijo;
- Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Budi Rachmat Kurniawan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Dudi Jocom, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kemudian dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 109 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 673 dan barang bukti elektronik nomor 1 sampai dengan nomor 40, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, seluruhnya dipergunakan dalam perkara Budi Rachmat Kurniawan;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI., tanggal 31 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 November 2018 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pidana denda dan pengganti pidana denda dan lamanya pidana penjara atas uang pengganti sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa Dudi Jocom, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
 - 2.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - 2.3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan

Hal. 110 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



hukum maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kemudian dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

2.4. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

2.5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

2.6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 673 dan barang bukti elektronik nomor 1 sampai dengan nomor 40, selengkapya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 November 2018, seluruhnya dipergunakan dalam perkara Budi Rachmat Kurniawan;

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2022/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2022, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 24 Mei 2022 dari Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 8 Februari 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 111 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak memiliki serta tidak disertai alasan yang cukup, tidak terdapat keadaan baru (*novum*) yang menimbulkan dugaan kuat yang dapat membebaskan atau melepaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dari tuntutan hukum ataupun yang dapat menyebabkan tuntutan pidana Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;
- Bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan hakim yang nyata dalam pertimbangan putusan *judex jacti*/Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI., tanggal 31 Januari 2019, karena substansi putusan *a quo* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*;
- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana mengenai adanya keadaan baru (*novum*), adanya pertentangan putusan serta adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum tidak dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan ke-2 dari Pemohon Peninjauan Kembali selaku Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2021 (Bukti PK-3) adalah bukan merupakan keadaan baru atau tidak berkualitas sebagai keadaan baru (*novum*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP;
 - Bahwa perbedaan penjatuhan pidana antara Terdakwa Budi Rachmat Kurniawan dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana bukan

Hal. 112 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan dua putusan yang saling bertentangan sebab masing-masing Terdakwa mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda sekalipun dalam kasus yang sama, yang telah dipertimbangkan dengan seksama oleh masing-masing Majelis Hakim *judex facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan bukti surat berupa putusan Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst., adalah perkara *splitsing* dari perkara *a quo* dan penjatuhan pidana dalam perkara satu dengan lainnya dipertimbangkan disesuaikan dengan perbuatan dan peran serta hal-hal lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terpidana sehingga dengan demikian bukti surat tersebut bukanlah merupakan dasar pengajuan upaya hukum peninjauan kembali berupa dua putusan yang saling bertentangan, oleh karena itu dalam perkara *a quo* tidak diketemukan adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan huruf c dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan dalil-dalil dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam permohonan peninjauan kembalinya hanya merupakan pengulangan fakta terhadap penilaian hasil pembuktian dan perbuatan materiil Terpidana telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Kedua;

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti* sudah tepat menerapkan hukum baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya, terlebih lagi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana juga tidak mampu membuktikan secara nyata mengenai adanya kekhilafan ataupun suatu kekeliruan yang nyata melainkan hanya mengemukakan perbedaan penafsiran yang pada

Hal. 113 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya tidak memenuhi syarat ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dapat mengancam batalnya *putusan a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b, c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Ir. DUDI JOCOM, M.Si.**, tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 114 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **4 Oktober 2023** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 115 dari 115 hal. Putusan Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023